



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI VIII DPR RI  
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

- Tahun Sidang** : 2020/2021  
**Masa Persidangan** : I  
**Rapat ke** : 27  
**Jenis Rapat** : Rapat Kerja  
**Dengan** : Menteri Agama RI  
**Sifat Rapat** : Terbuka  
**Hari, Tanggal** : Rabu, 23 September 2020  
**Waktu** : Pukul 10.30 -13.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung  
Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto,  
Jakarta 10270
- Acara** : 1. Penyesuaian RKA K/L Kementerian Agama  
Republik Indonesia sesuai hasil Pembahasan  
Badan Anggaran;  
2. Isu-Isu Aktual dan Solusinya;
- Ketua Rapat** : H. Yandri Susanto, S.Pt.  
**Sekretaris Rapat** : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
(Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Hadir** : 30 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI  
3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin
- Anggota yang Hadir** : **PIMPINAN:**  
1. H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN)  
2. M. R. Ihsan yunus, BA., B.Comm., Me.Con  
(F-PDI Perjuangan)  
3. DR. TB. H. Ae Hasan Syadzily, M.Si. (F-PG)  
4. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. (F-Partai  
Gerindra)  
5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)
- ANGGOTA:**  
**FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
6. I Komang Koheri, SE.  
7. Diah Pitaloka, S. Sos. M.Si.  
8. Selly Andriany Gantina, A.Md.  
9. Umar Bashor

10. Inna Ammania
11. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
12. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
13. H. Rachmat Hidayat, SH.
14. Matindas J. Rumambi, S.Sos.
15. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
16. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.
- FRAKSI PARTAI GOLKAR**
17. H. John Kenedy Azis, SH.
18. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
19. Mohammad Saleh, SE.
20. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
21. Muhammad Fauzi, SE.
22. Dra. Hj. Idah Syahidaj Rusli Habibie, M.H.
23. Muhammad Ali Ridha
- FRAKSI PARTAI GERINDRA**
24. M. Husni, S.E., M.M.
25. Dr.h. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
26. Abdul Wachid
27. Drs. H. Zainul Arifin
28. H. Iwan Kurniawan, SH.
29. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.
- FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**
30. Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MM.Tr.
31. Dra. Delmeria
32. Nurhadi, S.Pd.
33. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I.
34. Satori, S.Pd.I., M.M.
- FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
35. H. Maman Imanul Haq
36. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
37. H. An'im Falachuddin Mahrus
- FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
38. Drs. H. Achmad, M.Si.
39. Harmusa Oktaviani, S.E.
40. Wastam, S.E., S.H.
41. H. Hasani Bin Zuber, S.IP.
42. Ir. Nanang Samodra, KA., M.Sc.
- FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
43. KH. Bukhori, LC., MA.
44. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
45. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A.
46. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA.
47. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I
- FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
48. H. Mhd. Asli Chaidir, SH.
49. M. Ali Taher
- FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
50. KH. Muslich Zainal Abidin
51. H. lip Miftahul Choiri, S.Pd.I.

## Undangan

Wakil Menteri Agama Republik Indonesia (Drs. H. Zainut Tauhid) beserta jajaran

## **JALANNYA RAPAT:**

### **KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):**

*Bissmillahirrahmaanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*  
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

**Yang terhormat Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dalam hal ini mewakili penuh Menteri Agama Republik Indonesia.**

Karena beliau ada halangan dalam hal kesehatan, kita do'akan semoga Pak Menteri kembali bisa bersama-sama kita untuk beraktifitas menjalankan tugas keseharian dalam menunaikan tugas kenegaraan.

**Dan beserta seluruh jajaran, Pak Sekjen, para Dirjen pak Irjen dan Eselon II.**

**Yang saya hormati para Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI; baik yang hadir secara fisik diruangan Komisi ini maupun yang hadir secara virtual.**

**Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita dalam keadaan sehat wal'afiat. Oleh karena itu kita berharap rapat kerja ini dapat berjalan baik dan lancar, bisa menghasilkan keputusan-keputusan sebagaimana yang kita kehendaki.

Oleh karena itu, untuk lancarnya rapat kerja ini Pak Wamen dan seluruh Bapak/Ibu Anggota Komisi VIII mari kita berdo'a sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada yang beragama Islam kita membaca umul kitab Al Fatihah.

**Pak Wamen para Anggota dan Pimpinan yang saya hormati.**

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan acara rapat-rapat di DPR, Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2020 – 2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 13 Juli 2020 dan sesuai dengan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI, tanggal 18 Agustus 2020 maka pada hari ini Rabu, 23 September 2020 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili penuh oleh Wakil Menteri dengan agenda penyesuaian RKA K/L Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran serta isu-isu aktual dan solusinya.

Berdasarkan laporan dari Sekretariat Komisi VIII *alhamdulillah* sudah dihadiri secara fisik 10 Anggota, kemudian virtual 34, izin 5 Anggota dari 9 fraksi. Dan sebelum kami buka Rapat Kerja ini sebagaimana petunjuk dari Pimpinan DPR, para Anggota, bahwa dalam situasi pandemi Covid atau pandemic ini ada aturan baru yang dibuat oleh Pimpinan DPR masing-masing kehadirannya itu maksimal 20%. Oleh karena itu kita sudah atur sedemikian

rupa, berarti maksimal 12 orang ada hadir disini, dan sekarang sudah 10 itu berarti masih dalam koridor protokol kesehatan, termasuk nanti bertanya masing-masing fraksi sudah diatur, untuk F-PDIP 2 orang yang lainnya satu orang, satu orang. Oleh karena itu kalau nanti ada rembukan antar Kapoksi dan anggotanya mohon yang menjadi juru bicara bisa ditunjuk untuk menyampaikan pertanyaan, saran dan pendapat dalam Rapat Kerja kali ini.

Dari 10 Anggota, 34 Anggota virtual kemudian 9 fraksi, oleh karena itu izinkan kami Pak Wamen beserta para Anggota, berdasarkan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1) bahwa kuorum sudah tercapai, oleh karena itu izinkan kami membuka Rapat Kerja ini.

Dengan mengucapkan *bissmillahirrahmanirrahim*, Rapat Kerja ini saya buka dan terbuka untuk umum.

### **RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**

Baik agenda kita pada hari ini:

1. Pengantar dari Pimpinan rapat;
2. Penjelasan dari Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, mengenai penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, yang b
3. isu-isu aktual dan solusinya;
4. Respon atau tanya jawab dari para Anggota termasuk dari meja Pimpinan;
5. Kesimpulan; dan
6. Penutup.

Apakah agenda yang saya bacakan tadi bisa kita setujui? Setuju ya.

#### **(RAPAT: SETUJU)**

Kita mulai rapat tadi pukul 10.30 WIB, kita berakhir pukul 12.00 WIB dulu ya pak Wamen ya? Kalau nanti ada hal-hal yang perlu kita perpanjang kita lihat situasi yang berkembang nanti.

Setuju sampai pukul 12.00 WIB?

Setuju.

#### **(RAPAT: SETUJU)**

Baik.

**Pak Wamen beserta jajaran yang saya hormati.**

**Para Anggota dan para Pimpinan yang saya hormati.**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 98 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa tugas Komisi di bidang anggaran

adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi. Pada rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 14 September 2020 telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2021 sebesar Rp.66.961.386.828.000,-.

Selanjutnya, pada tanggal 15 September 2020 Komisi VIII DPR RI melakukan pendalaman pembahasan RKA K/L Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 dengan Sekretaris Jenderal dan para pejabat Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu pak Wamen beserta seluruh jajaran, Komisi VIII DPR RI pada Rapat Kerja kali ini ingin mendapatkan penjelasan dari jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil penyesuaian Badan Anggaran terhadap pagu anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2021, apakah ada perubahan atau tidak? Sebagaimana waktu kita bahas dengan para Eselon I.
2. Jika ada perubahan anggaran berapa besar nilai perubahannya dan mata anggaran apa saja yang telah direalokasi? Jadi pak Wamen nanti kalau ada perubahan fokusnya salah satunya ke yang perubahan itu pak, apa yang digeser kalau ada.
3. Kalau tidak ada perubahan ya tentu kita berarti rapat ini insyaallah tidak lama pak Wamen, karena tidak ada perubahan kan. Tapi sebelum saya akhiri kata pengantar ini pak Wamen beserta seluruh jajaran, sebagaimana rapat tanggal 15 September itu Menteri Agama dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa tidak ada pemotongan dana BOS. Kita semua menjadi saksi itu dan itu sudah menjadi konsumsi public. Tapi pak Wamen saya tiga hari terakhir ini juga mendapatkan WA kembali ini supaya kita tidak ada yang kita tutupi, Pak Wamen biar kita ini tidak dianggap dagelan Pak, tidak gaduh terus iya kan? Ternyata itu dana BOS masih dipotong sampai bulan Desember Pak. Per siswa Rp100.000,- kemudian yang RA Rp250.000,- yang dipotong.

Oleh karena itu mohon ini penjelasan Pak Wamen supaya sekali lagi keputusan di gedung yang terhormat ini bisa kita pertanggungjawabkan Pak. Artinya kalau waktu itu Pak Menteri sangat tegas sudahlah saya sudah bilang sama Karucan, sama Pak Dirjen, yang lain kan bisa dibatalkan dulu, yang penting ini dipenuhi. Nah itu kita sangat gembira pak, dan para kyai, para madrasah, kemudian guru-guru itu menyambut dengan gagap gempita. Tapi dengan adanya tetap dipotong itu saya kira perlu penjelasan lebih lanjut dari Pak Wamen, kenapa situasinya seperti itu pak? Sehingga kita tidak dianggap main-main mengambil sebuah keputusan di gedung yang sangat terhormat ini, dan tentu ini ditunggu-tunggu oleh publik utamanya kalangan madrasah, yang selama ini memang sangat mengharapkan ditengah pandemi ini tidak ada pemotongan dana BOS.

Jadi mohon ini pak Menteri, eh Pak Wamen kita *clearkan* hari ini pak, supaya janji kita tanggal 15 September 2020 dimasukan kedalam keputusan

rapat kerja bahwa tidak ada pemotongan dana BOS tahun 2020, ternyata sampai bulan Desember sudah dipotong Rp100.000,- per siswa. Saya kira ini perlu bagi kami sebagai Pimpinan Komisi VIII, memastikan informasi itu harus clear pak supaya tidak ada simpang siur dilapangan.

Yang kedua, Pak Wamen karena tahun 2020 ini hampir 21.000 pondok pesantren dapat BOP, dan kelihatannya itu memang berasal dari kan dana tambahan Rp.2.600.000.000.000,- anggaran berjalan, tidak ada di anggaran APBN yang awal, para pondok pesantren juga menanyakan bagaimana kelanjutan program BOP ini? dan di kita berharap ini tetap berlanjut. Kalau misalkan perlu payung hukumnya pak Wamen karena yang 2,6 triliun kemarin tidak masuk di pagu indikatif iya kan? Tidak dimasukkan dalam usulan dari awal Kementerian Agama kami berharap Pak Wamen nanti tahun 2022, atau nanti anggaran tambahan di 2021 di anggaran perubahan mohon dimasukkan Pak, supaya pondok-pondok pesantren atau madrasah-madrasah swasta, taman pengajian Al Qur an itu seperti sekarang mereka sudah sangat gembira, sangat senang ada kepedulian negara terhadap mereka, dan itu sudah mereka nikmati dalam situasi yang sangat sulit seperti ini ada seperti obat untuk menjadi jalan keluar dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Oleh karena itu Komisi VIII sangat mendukung kalaulah nanti misalkan di anggaran perubahan atau nanti direalokasi itu diprioritaskan untuk pondok pesantren atau kelembagaan agama yang lainnya, madrasah-madrasah swasta dan taman pengajian Al Qur an Pak. Kemudian di tahun 2022 kalau bisa pak Wamen pak Sekjen tolong langsung dimasukkan saja pak di pagu indikatifnya, biar nanti kita bahas disini itu bisa diajukan ke Kementerian Keuangan dan bisa dibahas di Badan Anggaran besar, sehingga itu tidak menjadi anggaran samping Pak, tapi di anggaran satu kesatuan dari glondongan yang kita kan ketok sebagai anggaran pagu indikatif.

Jadi itu penting Pak Wamen kami sampaikan karena itu manfaatnya sangat besar pak, manfaatnya sangat besar dan ternyata negara bisa Pak Wamen, yang selama ini belum pernah jaman pandemi negara walaupun sedang sulit ekonomi sedang minus, ternyata hadir Pak untuk pondok pesantren. Nah apalagi nanti kalau pandemi sudah berlalu kemudian ekonomi sudah membaik saya kira peningkatan bantuan BOP itu perlu kita putuskan dan tidak boleh kita hentikan Pak bantuan untuk pondok pesantren dan madrasah-madrasah swasta itu.

Jadi ini mohon Pak Wamen, Pak Sekjen dan para Dirjen itu dimasukkan secara resmi saja nanti jangan jadi anggaran tambahan atau anggaran berjalan disampaikan kepada DPR. Intinya kami mendukung penuh Pak kalau itu nanti disampaikan secara resmi untuk BOP pondok pesantren yang 2,6 triliun itu dimasukkan secara resmi diusulan tahun-tahun berikutnya. Kalau perlu lebih pak Dirjen Pendis, kalau bisa ya 3 triliun, 3,8 triliun termasuk mungkin untuk agama-agama yang lain, saya kira ini penting keberpihakan kita.

Nah kemudian Pak Menteri eh Pak Wamen walaupun nanti tidak ada perubahan, ini juga sinyal awal dari Komisi VIII pak Wamen. Seperti pengalaman tahun 2020 itu realokasi atau namanya optimalisasi itu kan

sangat besar sekali, hampir 1,6 triliun. Nah itu karena pandemi masih berlangsung pak. Kita tidak tahu, apakah tahun 2021 itu pandemic ini benar-benar berlalu atau masih seperti sekarang atau lebih parah atau ada penurunan kurva. Tapi yang pasti mohon dicermati yang 66,9 triliun ini pak Wamen mulai dari sekarang Pak Sekjen itu mulai disisir pak. Perjalanan dinas, paket meeting dan lain sebagainya itu jangan sampai nanti seperti kita mendadak tidak digunakan dan itu kalau bisa kita sisir sekarang mungkin di awal tahun 2021 kalau pandemi ini masih berlangsung dan tidak bisa ada perjalanan dinas, tidak maksimal, paket *meeting* tidak bisa dilaksanakan saya kira mohon di geser atau direalokasi ke pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan dana itu pak. Termasuk tadi untuk pondok pesantren, madrasah, perguruan tinggi keislaman negeri dan perguruan tinggi yang lain dan lain sebagainya.

Intinya kita harus siap selalu dengan kondisi apapun supaya serapan anggaran itu bisa maksimal. Kalau tidak maksimal nanti kita tambah untuk pondok pesantren beberapa triliun tadi akan menjadi hambatan dengan Kementerian Keuangan karena serapan anggarannya rendah. Oleh karena itu, mohon kiranya pak Wamen nanti sampaikan ke Pak Menteri sekarang memang akan kita setuju anggaran tahun 2021 tapi itu kan masih banyak sekali paket perjalanan dinas Pak, dan paket *meetingnya*. Itu o luar biasa saya sudah baca tadi sebelum rapat luar biasa totalnya. Nah kalau itu tidak bisa digunakan dalam hal paket meeting dan perjalanan dinas mohon segera kita sisir untuk realokasikan ke bagian-bagian yang memang betul-betul membutuhkan dan memerlukan.

Saya kira itu pak Wamen yang bisa kami sampaikan, sekarang kita dengarkan penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia yang diberikan kuasa penuh kepada Pak Wakil Menteri Agama oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan.

**WAKIL MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA (DRS. H. ZAINUT  
TAUHID):**

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

**Bapak Ketua Komisi VIII yang saya hormati; beserta  
Para Wakil Ketua Komisi VIII yang kami hormati.**

**Seluruh Anggota Komisi VIII baik yang berada di ruang sidang, maupun yang diluar, yang hadir in maupun yang hadir out, hadir in artinya hadir didalam, hadir out artinya yang masih ada diluar.**

**Para pejabat Eselon I dan Eselon II Kementerian Agama yang saya hormati.**

Kami juga mohon maaf bapak Pimpinan bahwa kami tidak hadir tim penuh karena sebagian juga mengikuti secara on line. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf sedianya adalah Rapat Kerja dengan Komisi VIII itu bapak Menteri Agama yang akan memimpin, tapi karena beliau dalam kondisi masih dalam perawatan hingga beliau menyampaikan

permohonan maaf dan juga mohon do'anya mudah-mudahan beliau bisa segera sembuh kembali, dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan baik dengan DPR maupun kegiatan di Kementerian Agama.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan Rahman Rahim-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Kerja pada hari ini, yang akan membahas penyesuaian rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga untuk Kementerian Agama tahun 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, dan juga isu-isu aktual dan solusinya. Raker ini merupakan tindak lanjut undangan Pimpinan DPR RI yang terhormat melalui surat nomor AG/11136/DPRRI/IX/2020 tanggal 18 September 2020.

### **Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang berbahagia.**

Kami akan menyampaikan rencana kegiatan anggaran untuk Kementerian Agama yang ini juga sudah menjadi bahasan dengan teman-teman di Komisi VIII. Yang pertama alokasi anggaran, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI Kementerian Agama mendapatkan anggaran sebesar Rp66.961.386.828.000,-. Uraianannya adalah nilai presentasi dan anggaran APBN tahun 2020 ada kenaikan sedikit dari Rp66.000.060.948.695,-. Untuk APBN 2021 pagu indikatifnya Rp66.673.486.995.000,- dan setelah melakukan atau penyesuaian anggaran menjadi Rp66.961.386.828.000,- ada penyesuaian kenaikan sedikit dari tahun 2020 ke 2021.

Alokasi anggaran berdasarkan fungsi program dan unit Eselon I dari alokasi anggaran tahun 2021 besaran fungsi pendidikan adalah sebesar Rp55.885.467.903.000,-. Adapun perbandingan besaran anggaran tahun 2021 berdasarkan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut: fungsi anggaran Rp11.075.918.925.000,- atau (16,54%) sedang fungsi pendidikan Rp55.885.487.903.000,- atau senilai (83,46%). Sehingga total anggaran Kementerian Agama sebesar Rp66.961.386.828.000,-.

Adapun besaran alokasi anggaran Kementerian Agama berdasarkan program dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Program dukungan manajemen yang pertama 35,7 triliun (Rp35.570.000.000.000,-) sedangkan anggaran penyesuaiannya sebesar 35,62 triliun (Rp35.620.000.000.000,-) ada selisih 46, 6 miliar (Rp.46.600.000.000,-).
2. Kemudian program kerukunan umat beragama dan layanan kehidupan beragama sebesar 3,27 triliun (Rp3.270.000.000.000,-) anggaran penyesuaian sebesar 3,2 triliun (Rp3.200.000.000.000,-) atau ada selisih 65,7 miliar (Rp65.700.000.000,-).
3. Pada pendidikan tinggi sebesar 6,25 (Rp6.250.000.000.000,-) anggaran pagu indikatif, dan anggaran penyesuaian 6,63 trilun (Rp6.630.000.000.000,-) atau ada selisih sebesar 377,8 miliar (Rp377.800.000.000,-).

4. Kualitas pengajaran dan pembelajaran sebesar 6,9 (Rp6.900.000.000.000,-) pagu indikatif, dan pagu penyesuaian sebesar 7,3 (Rp7.300.000.000.000,-) ada selisih 417,9 miliar (Rp.417.900.000.000,-).
  5. Pendidikan usia dini dan wajib belajar 12 tahun sebesar 14,6 (Rp14.600.000.000.000,-) pagu indikatif dan penyesuaian sebesar 14,16 (Rp.14.160.000.000.000,-) ada selisih 490,7 miliar (Rp490.700.000.000,-)
- Sehingga total anggaran pagu indikatif 66,67 triliun (Rp66.670.000.000.000,-) dan pagu penyesuaian sebesar 66,96 (Rp.66.960.000.000.000,-) ada selisih plus atau tambahan 287,89 miliar (Rp.287.890.000.000,-).

Fungsi alokasi anggaran tahun 2021 berdasarkan Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Sekretariat Jenderal (saya langsung ke pagu penyesuaian) sebesar 2,28 triliun (Rp.2.280.000.000.000,-) ini tidak ada mengalami perubahan artinya tetap;
  2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp170.124.955.000,- ini juga tidak mengalami perubahan;
  3. Dirjen Pendidikan Islam pagu indikatif sebesar 5,26 triliun (Rp5.260.000.000.000,-) menjadi 52,52 triliun (Rp52.520.000.000.000,-) ada selisih (0,49%);
  4. Dirjen Bimas Islam pagu indikatif sebesar 5,75 triliun (Rp5.750.000.000.000,-) menjadi Rp.575.000.000.000.000,- ada selisih (0,003%);
  5. Dirjen Bimas Kristen sebesar 1,85 (Rp1.850.000.000.000,-) menjadi 1,87 triliun (Rp.1.870.000.000.000,-) ada selisih (0.75%);
  6. Dirjen Bimas Katholik sebesar 880,5 miliar (Rp.880.500.000.000,-) menjadi 899,7 miliar (Rp.899.700.000.000,-) ada selisih (2,18%);
  7. Dirjen Bimas Hindu sebesar Rp803.751.000.000,- menjadi Rp803.751.000.000,- tetap tidak ada penambahan, tidak mengalami perubahan;
  8. Dirjen Bimas Budha sebesar 272,5 miliar (Rp272.500.000.000,-) ini juga tetap tidak ada perubahan;
  9. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh ada perubahan dari sebesar Rp.1.596.000.000.000,- menjadi Rp.1.593.000.000.000,- ada selisih minus (0,22%);
  10. Badan Litbang dan Diklat ini tetap Rp693.143.000.000 sekian;
  11. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini juga tetap sebesar Rp97.490.000.000,-
- Total keseluruhannya dari pagu indikatif sebesar Rp66.673.486.995.000,- menjadi Rp66.961.386.828.000,- ada kenaikan sebesar (0,43%).

Yang berikutnya alokasi anggaran berdasarkan sumber dana dan jenis pengeluaran pagu alokasi anggaran Kementerian Agama masih didominasi panganggaran yang bersumber dari rupiah murni, dengan anggaran sebesar Rp59.158.740.109.000,- atau sebesar (88,35%) naik sebesar (0,57%) dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2021. Adapun sumber dana yang berhasil berasal dari PNBP dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2021, mengalami penurunan sebesar (4,67%) atau berkurang Rp85.310.123.000,-.

Anggaran tabel 5 ini alokasi anggaran 2021 berdasarkan sumber dana saya kira ini bisa di ini alokasi anggaran berdasarkan sumber dana. Saya kira ini bisa dilihat pada tabel. Rupiah murni, saya baca penyesuaiannya 59,1 (Rp59.100.000.000.000,-) ya ada kenaikan Rp.325.000.000.000,- kemudian PNBP 1,74 (Rp1.740.000.000.000,-) ada selisih Rp.85.000.000.000,- BLU 2,01 ada selisih lebih Rp17.991.000.000,- kemudian luar negeri sebesar 660,3 miliar (Rp660.300.000.000,-) luar negeri Rp.660.300.000.000,- ini tetap, SBSN 3,36 triliun ada selisih 20,1 miliar. Kemudian rupiah pendamping, ini baru belajar ini, penyesuaian ada 18,4 miliar. Total sebesar Rp.66.961.386.828.000,-.

Alokasi anggaran berdasarkan sumber dana dan jenis pengeluaran, untuk pegawai, pegawai operasional pagu penyesuaiannya 31,34 triliun (Rp31.340.000.000.000,-) tidak ada kenaikan artinya tetap. Kemudian belanja barang atau barang operasional 2,89 triliun Rp2.890.000.000.000,- ada kenaikan Rp.5.147.000.000,- non operasional 37,7 triliun (Rp32.720.000.000.000,-). Ada selisih atau kenaikan 250,75 miliar totalnya sama.

Kemudian alokasi anggaran berdasarkan kewenangan pusat dan daerah. Satker di Kementerian Agama ini sangat besar, kewenangan pusat dan daerah didistribusikan pada 4.664 satuan kerja baik di pusat, instansi, vertikal maupun unit pelaksana teknis, anggaran terbesar terdapat pada satuan kerja daerah. Alokasi anggaran yang berada pada satuan kerja daerah meliputi 34 kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, 514 Kanwil Kemenag kabupaten/kota, 70 perguruan tinggi, 395 madrasah negeri, 17 Balai Litbang dan Diklat, kantor urusan haji di Jeddah dan Lajnah Pentashik Al Qur'an dengan total anggaran Rp59.422.487.000.379,- atau (88,50%). Sedangkan alokasi anggaran pada 11 unit Eselon I pusat adalah sebesar Rp7.703.160.450.000,- atau selisih (11,50%).

Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan pusat dan daerah, pusat 7,7 triliun (Rp7.700.000.000.000,-) atau (11,50%), daerah Rp.59.250.000.000.000,- atau 88,50 triliun (Rp.88,050.000.000.000,-) total saya kira sama.

**Bapak dan Ibu yang berbahagia.**

**Ketua Komisi yang saya muliakan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.**

Anggaran untuk penanganan ini isu-isu aktual tadi ada beberapa disampaikan tapi mungkin saya langsung merespon beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, selain juga yang kami sampaikan terkait masalah penanganan Covid-19 saya kira sudah pernah kami sampaikan. Dan

yang kedua berkaitan dengan BOP Pesantren tadi juga sempat masih dialami oleh Bapak Pimpinan. Dan yang ketiga penerapan pembelajaran jarak jauh. Untuk penerapan pembelajaran jarak jauh kami Kementerian Agama telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan surat Nomor MA/292/2020 tanggal 7 September 2020 tentang usulan tambahan anggaran tambahan, tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.853.129.468.000,- diharapkan tambahan bantuan ini dapat menjadi afirmasi dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh yang bermutu sesuai standar dan tidak membebani orang tua, guru, dan dosen secara ekonomi.

Baik yang tadi juga sempat disampaikan oleh bapak Pimpinan terkait dengan realisasi anggaran BOS, yang itu menjadi komitmen kami didalam rapat kerja dengan Komisi VIII. Akan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan usulan semula, artinya tidak melakukan, tidak dikembalikan menjadi angka kenaikan. Kami sampai dengan saat ini memang benar kalau disampaikan oleh bapak Pimpinan bahwa masih adanya pemotongan dalam realisasi, karena kami masih berdasarkan pada anggaran yang sudah ditetapkan awal. Sedangkan sekarang kami sedang berusaha mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama agar melalui BA BUN agar Kementerian Keuangan mengembalikan atau memberikan tambahan dana untuk dana BOS tersebut. Kami mengajukan angka sebesar 900 miliar (Rp900.000.000.000,-) artinya uang tersebut dikembalikan sesuai dengan rencana awal. Jadi mohon dengan hormat bapak-bapak Pimpinan kami akan terus berikhtiar, kami akan terus melakukan komunikasi, bahkan bapak Menteri Agama juga langsung sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan. Kami setelah dari Rapat Kerja ini akan terus *follow-up*-i dan menindaklanjuti untuk hal tersebut.

Yang kedua berkaitan dengan BOP Pesantren kami juga sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa BOP ini jangan sampai berhenti pada tahun anggaran 2020 sekarang. Kami komitmennya adalah bagaimana terus ada kelanjutan BOP ini, dengan angka 2,7 triliun (Rp.2.700.000.000.000,-) yang saya kira itu sangat memberikan angin segar, juga memberikan bentuk perhatian negara kepada pesantren. Dan kami juga sepakat bahwa untuk tahun 2021 ini memang belum teranggarkan. Namun kami berharap ketika nanti ada pembahasan perubahan atau anggaran perubahan ABPN Perubahan kami akan mengajukan adanya tambahan anggaran untuk mendukung biaya operasional pesantren. Untuk hal itu pastinya kami sangat berharap sekali dukungan dari bapak Ketua dan Pimpinan Komisi VIII, serta Anggota Komisi VIII, agar niat mulia ini juga bisa terlaksanakan dengan baik.

Untuk anggaran tahun 2022 kami sepakat itu langsung dimasukkan di dalam pagu anggaran, usulan pagu anggaran. Apalagi sekarang pondok pesantren memang sudah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang tentang Pondok Pesantren Nomor 18 ini bagian dari tanggungjawab kita bersama. Kemudian terkait dengan realokasi anggaran kedepan kami sepakat kami akan terus melakukan pencermatan melakukan evaluasi dari hari ke hari, karena memang rencana anggaran yang kami usulkan itu adalah masih dalam bentuk, dalam kondisi normal dan normal baru tapi pasti, setiap apa namanya setiap kuartal kami akan melakukan evaluasi, agar segera bisa

dilakukan optimalisasi, jika ada anggaran yang tidak terserap. Sehingga serapan anggaran kami nanti bisa maksimal, dan untuk itu sekali lagi kami juga mohon dukungan dari Komisi VIII bahwa setiap saat nanti ketika kami rapat kerja, pada tahun sidang berikutnya kami akan melaporkan, dan nanti kami akan juga mohon kalau misalnya nanti ada realokasi terkait dengan serapan dan juga usulan-usulan realokasi anggaran kami mohon juga mendapatkan dukungan dari teman-teman Komisi VIII.

Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan *akhirul-kalam*.

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, atas nama Menteri Agama Republik Indonesia sudah menyampaikan paparan sesuai dengan agenda kita pada hari ini. Responnya sangat cepat saya kira tadi Pak Wamen. Pertama kita sampaikan kepada pihak madrasah yang masih dipotong tadi, karena tidak bisa sim salabim, kira-kira begitu Pak Wamen ya? Yang jelas kita mengapresiasi kerja keras dari Kementerian Agama, sekarang sedang diusulkan ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk memenuhi komitmen Kementerian Agama terkait pemotongan dana BOS. Dan kami tahu juga untuk tahun 2021 Pak Dirjen Pendis itu kembali ke normal ya, tambahan Rp100.000,- itu sudah otomatis. Artinya tahun 2021 sudah kalau kami baca dari usulan pak Dirjen Pendis sudah memenuhi aspirasi Madrasah Pak Wamen. Saya kira ini juga patut kami apresiasi.

Kemudian yang kedua kalau dari 2,6 triliun (Rp2.600.000.000.000,-) itu kan masih (37,14%) Pak Dirjen. Saya kira ini perlu digenjot Pak Wamen karena tinggal 2 bulan lebih sedikit Pak. Jadi para pondok pesantren yang belum mendapatkan tahap pertama, akan kita usahakan mendapat tahap kedua karena berdasarkan yang ada badan hukumnya termasuk MDT dan TPQ. Ini saya kira mohon kerja sama juga para Kemenag kabupaten/kota, Kanwil dan begitupun untuk para Anggota supaya 2,6 triliun (2.600.000.000.000,-) ini Pak Syamsu Niang ini harus habis. Kalau tidak habis gimana mau minta lagi nanti? Jadi oleh karena itu pencermatan terhadap data yang masuk ke Kemenag itu tetap harus memenuhi standar keuangan negara pak. Kalau tidak ada badan hukumnya pak Sekjen jangan dikasih pak, jadi ini mesti kita ketat jangan sampai ada temuan BPK ataupun lembaga hukum yang lain.

Kemudian Pak Wamen, BOP tadi pesantren saya kira setuju Pak kalau bisa diawal tahun kita coba minta ke Kementerian Keuangan karena di pagu anggaran sekarang tidak masuk, walaupun saya baca juga pak Dirjen Pendis ada untuk madrasah swasta sekitar hampir 2.500 lebih Pak. Kemudian pondok pesantren juga segitu, tapi kan jauh dari sekarang, kalau sekarang 21.000 Pak pondok pesantren. Kalau tahun yang sudah dianggarkan 2021 hanya sekitar kurang dari 3.000 itu tentu jauh dari harapan. Tapi komitmen

kita Komisi VIII dan Kementerian Agama sudah ada gambaran untuk pondok pesantren dan madrasah saya kira itu patut kami apresiasi, dan mohon nanti usulan tambahan itu penting Pak Wamen. Jadi supaya nanti 2,6 triliun (Rp.2.600.000.000.000,-) atau 3 triliun itu bisa kita sepakati.

Kemudian yang lainnya ini tadi saya lupa Pak, banyak yang nanya ini calon jamaah umroh pak ini pak Wamen. Nanti nanya dijawab saja Pak. Katanya walaupun pak Dirjen PHU ini pernah menyampaikan itu belum untuk umroh, tapi ini dapat kabar lagi, katanya mulai 1 November, 1 November ya? Saya tidak tahu nanti kepastiannya bagaimana supaya nanti. Maksud saya, pak Dirjen PHU, yang merangkap Plt Sekjen, ini bisa menyiapkan informasi yang benar Pak kepada masyarakat, termasuk mungkin kita harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya tidak ada carut marut dan kendala-kendala yang berarti, ketika memang animo masyarakat ini sangat tinggi, jamaah sudah numpuk dan tentu ini akan menjadi persoalan serius kalau kita tidak atasi sedini mungkin secara teknis maupun non teknis. Oleh karena itu bagaimana respon dari Kemenag terhadap Pemerintah Arab Saudi yang akan membuka layanan jamaah umroh dari luar negara Arab Saudi, itu mulai 1 November. Saya kira ini penting bagi kita baik dari DPR maupun Kemenag untuk memastikan itu berjalan baik dan lancar.

Baik para Anggota, para Pimpinan sekali lagi saya sampaikan peraturan di jaman pandemi satu fraksi satu, kecuali PDIP dua. Ya jadi boleh berembuk siapa yang akan berbicara, dan maksimal bicara biasanya dalam waktu normal Undang-Undang MD3 itu 5 menit, sekarang bisa 4 menit atau paling lama 4,20 detik artinya maksudnya jangan panjang-panjang dan fokus ke anggaran.

Ya saya kira itu kami persilakan mulai dari PDIP Pak Syamsu Niang, dan Ibu Diah tentu nanti ya, silakan Pak Syamsu Niang.

#### **F- PDI PERJUANGAN (Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi beserta seluruh Anggota Komisi VIII.**

**Yang saya hormati Pak Wakil Menteri beserta seluruh Dirjen, Sekjen, Dirjen dan seluruh Eselon III yang hadir pada hari ini.**

Baik, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Wamen (Wakil Menteri) sebenarnya ini bukan lagi hal baru bagi kita. Karena ini sudah berulang-ulang kali kita dengarkan beliau ini, mulai dari Menteri Raker, pagu indikatif, terus Raker, terus Sekjen. Kita sudah dengarkan semua pemaparan mereka. Dan saya pikir apa yang disampaikan kita sudah paham dan sudah mengerti, sudah mengerti apa yang disampaikan itu, karena sudah tiga kali kita dengarkan ini. Apalagi yang mau dibahas? Karena sudah penyesuaian dari Banggar Besar ke Komisi VIII dan sebentar lagi akan ditetapkan gitu.

Jadi saya pikir Pak Ketua, tidak ada lagi yang perlu dibahas, karena sudah di sudah tiga kali kita ini dengarkan itu, itu-itu saja terus. Cuma sedih

saya ini pak Ketua, cuma sedih saya ini, cuma sedih saya ini. Tiba-tiba itu karena saya ini kan, duduk disini atas nama daerah pemilihan saya begitu ya, wajib memperjuangkan daerah pemilihan saya. Tiba-tiba itu tadinya saya sangat senang sekali begitu, bahwa ada harapan di Sulawesi Selatan sana. Tiba-tiba hilang seperti fakta morgana gitu kan. Aduh sedih saya ini Pak.

Jadi olehnya itu Pak Ketua, karena itu saya pikir Pak Ketua, hanya harapan saya ini pak Dirjen ya, pak Dirjen, pak Sekjen ya, pak Wamen mudah-mudahan ada keajaibanlah kembali kira-kira, ada keajaiban kembali. Karena kasihan disana itu. Sudah PUPR sudah membangun rumah sakit pendidikan disana, sudah *ready* semua, kalau tidak ada alat-alatnya gimana itu mau diperjuangkan rumah sakit di UIN Alauddin Makassar itu?

Jadi kalau ada hal yang memang ini penting pak, karena ini kemaslahatan. Karena bayangkan kalau sudah gedungnya sudah ada, sudah di, lengkap semua ya tiba-tiba hilang seperti fakta morgana. Ini menjadi perhatian Pak Ketua pada hari ini, minimal bisa menjadi kesimpulan supaya mengikat, bahwa UIN Alauddin itu Alkesnya itu ke depan bisa menjadi prioritas. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Tadi pak Syamsu Niang mau pulang pak Wamen, karena katanya sudah bolak-balik bahas ini. Ya tapi memang siklusnya begitu. Ya siklus anggaran yang harus kita penuhi memang seperti ini, dan tadi Pak Syamsu Niang saya sudah sampaikan insyaallah nanti kalau dalam tahun anggaran berjalan, apa kita anggaran tambahan ataupun realokasi, saya kira memang pak Wamen UIN Alauddin Makassar itu gedungnya sudah selesai Pak, isinya tidak ada.

Ya jadi ini perhatian kita juga sebagai pemutus anggaran baik itu Kemenag maupun Komisi VIII di samping rumah sakit Syarif Hidayattullah ya? Itu harapan kita memang ada rumah sakit Alauddin itu bisa beroperasi, dan itu menjadi kebanggaan kita nanti kalau benar-benar bisa sesuai dengan rencana. Oleh karena itu nanti mungkin diskusi kita sudah panjang pak Syamsu Niang iya kan? Tetap menjadi fokus kita pak, apalagi Pak Syamsu Niang ini sangat rajin dan luar biasa di Komisi VIII setiap hari datang, kadang-kadang juga tapi kan.

Saya kira itu Pak Syamsu Niang nanti insyaallah tetap kita akan perhatikan, lanjut ibu Diah Pitaloka, Kapoksi dari PDIP.

#### **F- PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA):**

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**Pak Wamen juga para Dirjen, Plt Sekjen dan seluruh jajaran Kementerian Agama.**

Alhamdulillah kalau dilihat anggaran Kementerian Agama ya masih cukup stabil ya? Artinya tidak ada perubahan signifikan dan kalau melihat fungsi-fungsinya sudah menurut saya apa yang bicara, dibicarakan sudah mulai mewujud dalam pola perubahan konstruksi anggarannya. Nah yang ingin saya mungkin juga kita perlu untuk memikirkan, inikan kondisi anggaran kita tentunya akan fluktuatif karena Covid. Nah artinya kondisi apa yang kita bahas dalam anggaran kali ini, ya *alhamdulillah* tahun ini masih bertahan, artinya berjalan seperti biasa gitu ya, programnya, alokasi anggarannya ada beberapa penyesuaian anggaran Covid. Tapi kedepan mungkin juga kita perlu memikirkan prioritas-prioritas anggaran yang akan diutamakan apabila kondisi anggaran atau keuangan negara, butuh penyesuaian-penyediaan ke depan. Karena pendekatannya tentu tidak akan selalu bisa seperti biasa, kita juga harus paham bahwa kita harus sensitif juga terhadap krisis, termasuk juga krisis yang ya karena pandemi ini ya. Jadi tentunya anggaran ini semoga satu tahun ini ya 2021 dampak pandeminya atau bahkan pandeminya sendiri bisa berkurang.

Tapi kita berharap Kementerian Agama juga punya skala prioritas apabila ada penyesuaian-penyediaan anggaran yang terjadi akibat krisis itu. Jadi pola anggaran format seperti biasa tentu ya *alhamdulillah* kalau hari ini masih bisa berjalan ya, pendidikan, rumah ibadah, pesantren, perguruan tinggi, bahkan juga MDT, TPQ sampai ke level kecil ya. Nah nanti ya saya juga berharap Kementerian Agama ada prioritas-prioritas anggaran pokok, dan prioritas-prioritas anggaran yang sifatnya penguat begitu. Jadi tidak general begitu, karena saya khawatir ada beberapa kondisi yang harus kita sikapi, dan salah satunya juga ada penyesuaian Kementerian Agama. Jadi tulang-tulang punggung program-program yang menjadi tulang punggung Kementerian Agama itu perlu diperhatikan.

Saya juga terutama pasti juga tidak mudah untuk mengatur pelaksanaan haji dan umroh. Haji dan umroh kan masih fluktuatif, belum tentu juga. Ya kira berharap tahun depan haji berjalan, tapi itupun pasti penyusunan anggarannya juga pasti spesial. Terutama juga ada penyesuaian anggaran akibat Covid. Nah ini kan pasti tidak seperti biasa kita menyusun anggaran haji. Nah kaya gini-gini jangan nanti dadakan kalau bisa disiapkan juga oleh Dirjen Haji dan Pak Nur juga sebagai Plt. Sekjen bisa corat-coret juga karena haji ini juga pasti kondisinya dinamis begitu, dan ada penyesuaian dengan kondisi Covid. Jadi perlu kita ya siapkan alternatif-alternatif dalam eksekusi anggarannya apabila kondisi ekonomi dan kondisi ya terutama haji dan umroh itu ada, akan ada dinamisasi, dinamis dalam kerangka menghadapi Covid ini. Ya mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Pak Wamen nanti memang kita minta ke Kemenag, pak Menteri dan para Dirjen atau Eselon I kalau bisa Januari nanti kita sudah mulai bicara

tentang realokasi. Kalau tidak nanti perjalanan serapan anggaran maupun situasi kekinian masalah Covid ini tidak bisa kita ikuti dengan politik anggaran. Oleh karena itu nanti mungkin awal Januari, intinya Komisi VIII siap saja Pak untuk realokasi sesuai dengan kondisi kekinian, situasi bangsa kita.

Terima kasih Bu Diah dari PDIP, kami lanjutkan PPP ada? Pak lip atau Pak Kyai Muslich? Tidak ada? Lanjut Golkar silakan pak Ali Ridho dari Dapil Madura Raya. Silakan pak Ali.

#### **F- P. GOLKAR (MUHAMMAD ALI RIDHA):**

Terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati.**

**Rekan-rekan Komisi VIII yang saya hormati.**

**Yang saya hormati Pak Wamen dan jajarannya.**

Sedikit saya ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh ketua bahwa, BOP itu diharapkan tetap dipertahankan ke depan karena itu sangat bermanfaat dan di lapangan pondok pesantren, madrasah itu ditengah pandemic ini mereka sangat terbantuan, dan mereka banyak mengucapkan terima kasih dan meminta serta memohon kepada kami sebagai wakil dari Madura memohon agar ke depan itu tetap dipertahankan karena itu sangat membantu.

Tetapi ada sedikit catatan saja Pak Wamen dari pelaksana BOP itu masih ada sedikit kendala. Misalnya begini, rekomendasi yang sudah dikeluarkan dari Kementerian Agama tapi tersendat pada pencairan, di bank misalnya Bank BRI. Kendalanya misalnya antara nama yayasan dan nama pesantrennya itu sebenarnya tidak berbeda, hanya tidak lengkap saja. Kemudian waktu rekomendasi keluar dari Kementerian Agama, tetapi waktu dia akan mencairkan itu dia tidak bisa.

Dari saya ada dari sekian itu yang saya sampaikan ada dua yang sampai saat ini yang rekomendasinya keluar tapi tidak bisa dicairkan. Misalnya Darul Ulum Al Amiin misalnya nah pondoknya Darul Ulum, yayasannya Darul Ulum Al Amiin, ada hanya selisih kata-kata seperti itu, tetapi rekomendasi dari Kementerian Agama sudah keluar. Nah maksud saya petugas bank itu ketika dia sudah ada rekomendasi dari Kementerian Agama ya sudah cairkan saja, karena anggaran bantuannya dari Kementerian Agama.

Itu yang pertama, yang kedua terkait informasi tentang pelaksanaan umroh yang tadi disampaikan juga oleh pak Ace. Saya juga mendapatkan informasi bahwa infonya tanggal atau November-lah, entah itu tanggal 1 atau berapa November. Tetapi saya juga mendapatkan informasi bahwa itu belum tentu Indonesia termasuk yang akan dibuka. Nah itu mungkin yang nantinya kita mohon kepada Kementerian Agama untuk bisa memastikan pelaksanaan umroh itu misalnya di November itu bagian Indonesia termasuk bagian yang bisa melakukan ibadah umroh itu.

Sementara itu saja Pak Ketua, terima kasih *billahi taufiq wal hidayah*.

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Ali Ridho dari Golkar. Memang yang paling penting itu Pak Wamen, karena memang sudah ada mandat Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 itu Pak salah satu pasal itu sumber dari pendanaan itu APBN dan APBD disebut Pak. Nah oleh karena itu tidak salah nanti kalau Kemenag dan Komisi VIII mengusulkan secara langsung di pagu anggaran Pak. Itu sudah mandat dari Undang-Undang Pesantren menyebut secara leterlek bahwa sumber pendanaan itu dari APBN dan APBD.

Kami lanjutkan ke PAN, ada PAN?

**F-PAN (Dr. M. ALI TAHER, S.H., M. Hum.):**

Jangan sampai lewat-lewat.

**KETUA RAPAT:**

Tadi bukan. Tadi saya lihat tadi belum datang, baru datang kan?

**F-PAN (Dr. M. ALI TAHER, S.H., M. Hum.):**

Saya dari Baleg, Baleg.

**KETUA RAPAT:**

Baru hadir ke Komisi VIII kan?

**F-PAN (Dr. M. ALI TAHER, S.H., M. Hum.):**

Eenggak, baru datang.

**KETUA RAPAT :**

Yang penting jujur belum datang. Silakan Pak Ali.

**F-PAN (Dr. M. ALI TAHER, S.H., M. Hum.):**

Bissmillahirrahmanirrahim,

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Pertama bersyukur kita bisa berjumpa lagi, kedua kita mendo'akan agar Pak Menteri cepat sehat kembali seperti semula. Kemudian yang ketiga Kementerian Agama semakin kompak meskipun ada dinamika jangan terlalu dipikirkan. Karena itu bagian dari dinamika untuk membangun kebersamaan dan kesahajaan.

Apalagi, saya lihat Pak Wamen hari ini nampaknya juga kelihatan bijak sekali dari pecinya kelihatan. Jadi pak Sekjen semua para Dirjen semua bersyukur. Kita tidak panjang pertanyaan-pertanyaan mengenai umroh ini sekarang mengemuka, perlu dijelaskan kira-kira waktunya kapan? Apakah ada kepastian? Seperti ustadz saya Pak Ali Ridha tadi sama-sama Ali tapi saling meridhoi.

Kemudian yang ketiga itu terkait dengan persoalan keberangkatan haji, ini terutama haji khusus itu banyak yang bertanya apa masih ada pendaftaran, sudah saya tidak bisa jawab karena itu perlu rapat kerja dan kepastian daripada Eselon atau pejabat dari Kementerian Agama. Yang ketiga terima kasih pak paket-paket bantuan untuk Covid madrasah-madrasah, madrasah di diniyah, takmilyah dan macam-macam kami sudah terima Pak. Tapi nampaknya juga masih kurang, banyak yang meminta tambahan.

Terakhir saya kira saya tidak panjang terima kasih pak Menteri rencana keberangkatan kita ke Nusa Tenggara Timur ditunda sampai kesembuhan pak Menteri. Ini sebagai penghormatan dan rasa takzim kita kepada pak Menteri, tidak eloklah kita memaksakan perasaan kemudian ada sahabat kita yang masih sakit. Empati saya kepada beliau sangat tinggi meskipun kadang-kadang di forum agak terbuka, tetapi saya suka ber WA berdua. Jadi biarlah permasalahan ini tidak cepat berlalu. Saya kira ini saja.

Terus kemarin saya kira perlu ada beberapa teman dari Dirjen Bimas Katolik itu meminta pandangan saya mengenai anggaran yang masih sangat sedikit. Nah oleh karena itu perlu di Pak Dirjen, Pak Sekjen saya mohon dipikirkan supaya terutama di daerah-daerah Flores Timur Pak. Flores itu banyak sekali sekolah menengah katolik itu tidak mendapatkan bantuan. Jadi didalam forum terbuka ini saya ingin menyampaikan itu. Terima kasih Pak Yandri sebelum ditegur sudah 3 menit.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Ali Taher komisaris utama Komisi VIII yang sudah dengan sangat lembut Pak Wamen menyampaikan hal-hal yang memang tidak perlu dikerasin lagi. Tadi Pak Yohanes sudah dapat dukungan karena memang Pak Ali ini pPk kecuali ngurus Banten dia ngurus NTT, dan itu alasan dia kadang-kadang saya cari kabur dia, dimana lagi di NTT itu paling

gampang Pak. Jadi karena tempatnya banyak pak Wamen, iya tapi beliau ini sangat luar biasa.

Lanjut pada fraksi berikutnya fraksi Gerindra, silakan Pak Husni.

#### **F- PARTAI GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VIII dan seluruh jajarannya.**

**Yang saya hormati sahabat-sahabat saya dari Komisi VIII.**

**Yang saya hormati Bapak Wamen, Pak Dirjen dan seluruh jajarannya.**

Yang pertama kami melihat tentang hal-hal tadi anggaran berdasarkan fungsi. Di sini inputnya kami melihat pendidikan itu 83,46%, dan keagamaan 16,54%. Berarti di sini outputnya adalah mencerminkan dengan pendidikan agama yang baik akan menghasilkan umat, manusia-manusia yang beradab, taat beribadah dalam kehidupan sehari-hari, dan memandang baik tentang kehidupan dan kerukunan umat beragama.

Cuma berbicara tentang agama berarti kita berbicara tentang keberagaman, kita berbicara tentang kerukunan, adat, budaya dan agama itu sendiri. Mohon kepada pak Wamen kami mintakan supaya sendi-sendi kearifan lokal yang sudah ada, dan yang sudah baik, yang selama ini kita pertahankan, mohon seperti FKUB untuk dapat diperkuat. Karena kami di Sumatera Utara itu biasa dengan pemerintah setempat kami selalu duduk bersama dengan selaku tokoh adat ataupun tokoh agama atau tokoh masyarakat. Biasa di tempat kami disingkat dengan Tomas dan Toga. Karena begini Pak Wamen, kita sangat mengharapkan bahwa di republik ini yang hari ini tingkat kerukunan beragama kita sudah baik kita jaga, kita pelihara dan kita harus terus turun ke lapangan bersama para tokoh adat dan tokoh agama.

Di sini saya melihat ya, apa yang tadi Pak Wamen sampaikan tentang pembiayaan kerukunan umat beragama. Ini saya lihat turun 1,95% itu nilainya lumayan signifikan yaitu 63,75 miliar. Kita, Pak Wamen kita belajar dari sejarah. Kemarin waktu itu, pak Ketua kita duduk ada dari apa itu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, salah satu yang mereka ungkapkan permasalahan disana adalah masalah konfliknya di daerah Singkil. Ya daerah Singkil ada pembangunan rumah-rumah ibadah dan lain sebagainya. Saya, Pak Wamen, saya di Sumatera Utara kebetulan saya Ketua DPP Adat artinya saya tokoh masyarakat disana, saya sampaikan kepada yang mewakili dari UIN. Itu selalu biasakan penyelesaian masalah-masalah seperti ini jangan sekali-kali mengedepankan yang paling terdepan yaitu keamanan. Itu bukannya makin mengecil tapi makin melebar.

Jadi kebiasaan kami di Sumatera Utara kita selalu mendudukan para tokoh adat dan tokoh agama supaya ini konflik-konflik keagamaan, konflik-konflik masalah suku ini bisa teratasi dengan baik. Karena kalau sudah masuk jadi konflik itu biayanya sangat mahal. Namun begitu Pak Wamen tadi kami melihatnya ada sedikit pemotongan, mohon tetap untuk daerah-daerah yang

berpotensi, yang mempunyai masyarakatnya yang heterogen itu nilai-nilai apa pembiayaannya itu mohon untuk tidak dapat dikurangi. Itu yang pertama.

Dan yang kedua, ini tadi yang disampaikan pak Ketua masalah umroh. Ya ini kami mohon supaya ditetapkan sebuah kepastian. Jadi Pak Ketua, saya waktu pertama kali masuk ke Komisi VIII ini waktu itu saya berhadapan dengan orang-orang yang umroh-umroh yang batal berangkat. Salah satu waktu itu pak Wamen itu ada dari First Travel. Jadi waktu itu di acara rapat seperti ini langsung saya daftarkan ada namanya bu itu langsung saya daftarkan mereka umroh. Jadi beliau itu memang sangat berharap begitu ya.

Kemudian juga masalah pencairan BOP, ini masalah pencairan BOP *alhamdulillah* Pak Wamen di Sumatera Utara -kebetulan ada saya bagi Sumatera Utara dan Aceh yang melalui tangan saya- itu semuanya *alhamdulillah* tidak ada kendala, tidak ada kesusahan apapun. Karena kebetulan Pak Ketua, Kakanwil BNI-nya kawan saya. Jadi setiap mereka ada masalah macam mana tuh saya bilang sama Kanwilnya tolong dibereskan, karena ini urusan umat. Jadi memang kadang-kadang Pak Wamen kita perlu juga loby-loby seperti ini.

Ya saya rasa itu saja pak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Ya walaupun temannya BNI tidak ada pemotongan kan? Tidak ada. Baik terima kasih Pak Husni dari Fraksi Partai Gerindra. Kami lanjutkan fraksi PKS silakan Pak KH. Bukhori Yusuf Dapil Jateng I.

#### **F-PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):**

Terima kasih pak Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.  
Pak Wamen dan seluruh jajaran yang saya hormati.**

Saya ini kalau menghadapi Pak Wamen agak berbeda Pak. Beliau ini senior saya, dan beliau yang memberikan mentor saya dalam *basic training* di IPPNU. Jadi agak susah ini kalau saya keras-keras sama beliau ini pak. Tapi paling tidak ini menjalankan tugaslah, Pak Wamen ya.

**Bapak, Ibu sekalian.**

Saya mencermati. Jadi dalam anggaran secara keseluruhan ini menurut saya perlu dibenahi dalam pola penganggaran. Yang pertama basis penganggaran kita tahun 2021 ini masih berbasis kepada normal. Padahal kalau kita melihat logika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, itu bahwa

Covid-19 itu sampai kemudian 2022, sehingga dengan demikian memang perlu suasana tentang Covid ini harus mencerminkan suasana penganggaran kita tidak boleh normal.

Yang kedua, kelemahan dalam penganggaran kita juga kurang berpihak kepada swasta Pak. Ini saya tahu Pak Wamen ini punya banyak pesantren Pak di Jepara itu beliau. Jadi bertetangga sama beliau. Jadi kalau kita lihat Pak Wamen, seluruh madrasah itu 93% lebih, data Kementerian Agama tahun 2014 itu adalah sampai mencapai 97% madrasah swasta. Sementara hanya kurang lebih sekitar 3% itu atau kurang dari lebih dari yang negeri, sementara penganggarnya nyaris tidak ada keberpihakan. Saya kira itu catatan penting untuk ke depan.

Karena itu Bapak, Ibu sekalian saya sangat setuju tadi yang disampaikan oleh Pimpinan, perlu anggaran yang 2,6 atau 2,7 atau bahkan mencapai 3 triliun. Itu tolong kemudian segera diajukan untuk menjadi keberpihakan dan wujudnya negara memberikan pembelaan terhadap sekolah-sekolah anak bangsa sendiri. Itu satu.

Yang kedua, dengan demikian maka sesungguhnya bantuan untuk operasional madrasah yang tahun 2020 kemarin untuk 20.000 pesantren itu sekarang-kurangnya harus menjadi anggaran tetap buat Kementerian Agama dan seterusnya, tidak hanya musiman, sebagai bentuk kepedulian. Dengan demikian kalau tahun ini itu hanya sekitar 4.000 Pak ini ya? E, 5.000 kan jauh banget ini, 5.000 dari 21.000. Jadi saya kira ini swasta memang harus mulai disentuh hatinya dan disentuh ruang-ruangnya supaya Kementerian Agama ini betul-betul kementerian yang memberikan keberpihakan kepada perhatian yang baik kepada sekolah swasta.

Nah kemudian berikutnya adalah saya ingin menegaskan ini Pak Wamen, tadi disampaikan masalah BOP ya, sorry masalah BOS yang dipotong. Itu sesuai dengan rapat kita pada tanggal 8 September 2020, kan kita sepakati, bahwa itu dikembalikan. Tadi disampaikan bahwa memang kenapa sekarang masih terjadi pemotongan itu perlu harus direm dulu dari Kementerian Keuangan kita mengerti tetapi kira-kira tolong diberikan waktu kira-kira kapan itu selesai. Jadi pengembaliannya itu madrasah itu sudah mulai alhamdulillah ketika kita sampaikan Pak waktu di daerah-daerah itu saya menyampaikan itu mereka juga tepuk tangan Pak, alhamdulillah ini. Jadi untuk madrasah ini. ya tolong diberikan waktu kira-kira kapan.

Dan berikutnya Pak Wamen, lalu kemudian terkait dengan masalah realokasi anggaran, ini saya kira juga perlu. Karena misalnya kalau tadi Pak Samsu Niang beliau mengibaratkan ada sesuatu anggaran yang menjadi harapan untuk ke Dapil begitu lho. Artinya pembelaan kita karena kita ini memang disumpah untuk memperjuangkan Dapil masing-masing. Misalnya pembangunan pesantren tadi adalah untuk kaitan isi daripada rumah sakit. Di Jawa Tengah misalnya adalah pengajuan untuk pesantren di Wali Songo. Saya kira itu juga akan lebih baik Pak. Jadi suasana kebatinan anggaran kita mulai dari bulan Januari pak 2021 bahkan kemudian paling lambat Februari itu sudah mulai dilakukan satu ancer-ancer pengalokasian atau pencermatan mana anggaran-anggaran yang bisa direalokasi jika kemudian kondisi Covid ini kemudian terus berjalan.

Dan kemudian saya juga, kemudian apa namanya memberikan apresiasi kepada pak Kementerian Agama khususnya rapat hari ini di Pimpinan oleh Wakil Menteri Agama berkuasa penuh ini. Wakil menteri agama berkuasa penuh. Ini jadi saya kira apresiasi ya terkait dengan respon khususnya terhadap dana BOS 2021 tadi saya kira, dan tahun 2021 sudah normal ya Pak ya? Jadi tahun 2021 sudah dipastikan ini didengar oleh madrasah-madrasah sudah normal kembali tidak ada pemotongan. Yang tadi kita bicarakan sebenarnya hanya potongan di pertengahan tahun 2020 sampai akhir tahun 2020.

Nah selanjutnya Pak Ketua. Jadi sekali lagi kami menyampaikan ada beberapa titipan ini dari Anggota kami. Pertama terkait bantuan untuk mahasiswa yang di luar negeri, khususnya ini Dapil Pak KH. Muhammad Hidayat Nur Wahid. Beliau ini sebenarnya secara pribadi juga sudah membantu beberapa mahasiswa, sejumlah mahasiswa di berbagai macam khususnya mahasiswa yang sekolah di luar negeri yang belajar agama. Saya kira ini kita minta kepada Menteri, kepada Kementerian Agama memberikan atensi khusus. Saya minta Pak Ketua supaya ini dimasukkan di dalam kesimpulan, karena nanti supaya darimana sebenarnya karena mereka umumnya adalah kalau dari sisi ekonomi kelas menengah ke bawah Pak, mereka. Tetapi mereka ada di Mesir, di Sudan, di Yaman, di Yordan, kemudian juga ada di Suriah, kemudian juga ada di beberapa negara, Arab Saudi bedalah, kalau mahasiswa luar negeri Arab Saudi mereka paling tidak sekurang-kurangnya sudah memadahi, tapi mahasiswa tersebut.

#### **WAKIL MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:**

Dapat mukafaah itu Pak.

#### **F-PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):**

Merasakan rupanya Pak Wamen juga. Mukafaah dari Arab Saudi, beliau pernah mendapat mukafaah dari LIPIA masalahnya itu Pak.

Kemudian yang terakhir ini Pak Wamen, terkait dengan masalah kita menemukan, menemukan setelah kita melakukan *road show* ke pesantren banyak sekali pesantren-pesantren kita yang belum memiliki legal Pak. Jadi saya kira ini juga perlu Pak, perlu dibantu. Bagaimanapun juga ini merupakan cermin etalase dari Kementerian Agama. Jadi kita perlu membantu kepada pesantren-pesantren, TPQ-TPQ, madrasah-madrasah diniyah terutama ini ya, umumnya mereka tidak punya legalitas, legalitas hukum. Sehingga ketika untuk mengadvokasi berbagai macam hal yang berkenaan dengan APBN itu menjadi sangat susah. Nah ini saya kira juga merupakan kewajiban kita bersama, supaya itu dimasukkan di dalam perhatian dari Kementerian Agama.

Yang paling terakhir kami mohon Pak, masalah sertifikasi da'i walaupun disebut dengan da'i bersertifikat ini di masyarakat masih spekulasi. Banyak sekali berbagai macam da'i-da'i kita yang mengkritik sangat keras,

kami berharap kemarin sudah kadung diluncurkan mohonlah ditinjau kembali supaya bisa mengambil hati masyarakat di saat pandemi seperti ini mestinya negara bersama bangsa itu bersama-sama.

Dan paling terakhir sekali terkait dengan BPJPH, JPH ini saya kira memang dari tahun ke tahun anggarannya semakin menurun. Nah ini kemudian apakah ini menunjukkan bahwa negara semakin tidak serius mengurus masalah ketidakhallalan makanan atau minuman yang halal tidak halal. Ini kan sangat berbahaya sekali. Jadi saya kira tolong dari BPJPH sebelum apa namanya, sebelum terjadi perubahan undang-undang di Omnibus Law tentang Cipta Kerja, saya kira persoalan yang paling mendasar tentang dua hal pertama terkait dengan masalah surat daripada, atau keputusan menteri terkait dengan tarif, ya tarif di BPJPH karena ini adalah BLU dan yang kedua terkait dengan komplikasi antara pengadaan terhadap auditor-auditor syari'ah yang kemudian terkesan agak susah, coba tolong kemudian ditingkatkan supaya lebih mudah, sehingga lembaga-lembaga pemeriksa produk halal itu semakin diperbanyak dan kemudian semakin bisa menampung sangat banyak.

Demikian Pak Ketua. *Wallahulmuafiq illah aqwamithariq.*

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Kyai Bukhori banyak sekali yang terakhir tadi pak, berapa kali saya hitung, tapi memang penting yang disampaikan. Cuma yang da'i yang bersertifikat walaupun Pak Wamen sudah mengklarifikasi itu dan programnya bagus ya Pak Qamar dari Bimas itu untuk da'i yang berwawasan kebangsaan, kira-kira gitu. Jadi memang di masyarakat masih digoreng-goreng Pak, lama-lama hangus kalau tidak kita antisipasi. Terima kasih sekali lagi Pak Kyai Bukhori, kami lanjutkan ke Nasdem silakan Pak Satori.

#### **F- PARTAI NASDEM (SATORI, S.Pd.I., M.M.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII serta Anggota;  
Pak Wakil Menteri dan para Dirjen, serta para Direktur yang ikut hadir secara langsung; dan juga  
Beberapa teman Komisi VIII yang ikut hadir mengikuti secara virtual.**

Terkait dengan bantuan operasional Pak itu yang lebih spesifik karena sangat dibutuhkan sekali dan memang kondisinya memang tahun keberuntungan. Adanya Covid ternyata *alhamdulillah* tahun 2020 semua lembaga pondok pesantren dan MDTA, TPAT itu bisa mendapat bantuan.

Namun, dari persoalan yang di lapangan antara emis dan izin operasional wilayah dengan pusat itu terkadang tidak sinkron. Misal emis-nya di Kementerian Agama keluar, tapi di bawah lembaganya sudah tidak aktif, berarti emis-nya harus *update* begitu. Dan berharap dari dana BOP itu lebih fleksibel karena dari beberapa daerah dari luar Jawa yang memang misalkan untuk operasional dalam pengurusan BOP, ongkos mereka ke bank, kemudian beli materai dan lain-lain, jarak tempuh dari kampungnya itu menuju kantor bank itu sangat jauh. Itu yang terjadi di luar Jawa sana begitu.

Kemudian dengan kondisi alokasi anggaran tahun 2021 berdasarkan sumber dana ini penyesuaian. Saya lihat Kementerian Agama itu ada Rp66.961.386.000.828,- terima kasih sudah banyak bantuan BOP namun alangkah lebih baik kalau memang Kementerian Agama ini bisa menambahkan alokasi anggarannya yaitu untuk guru-guru ngaji di kampung, didaerah. Karena mereka bukan gaji, tapi stimulan. Stimulan dari pemerintah daerah yang mengandalkan dana APBD terkadang Rp150.000,- per bulan itu sifatnya stimulan bukan gaji. Tapi kalau Kementerian Agama ini bisa mengalokasikan atau bisa menambahkan lagi itu sangat lebih positif lagi untuk Kementerian Agama diterima di tengah-tengah para ustadz atau ustadzah yang mengajar ngaji di kampung-kampung, di desa-desa yang sangat memberikan perhatian kepada anak bangsa itu.

Kemudian berkaitan dengan tadi Pak Wamen menyampaikan bahwa alokasi anggaran tahun 2021 berdasarkan kewenangan pusat dan daerah untuk kantor urusan haji di Jeddah dan Lajnah pentasih Al Qur'an dengan total anggaran sebesar Rp59.422.487.309.000,- atau 88,5%. Sedangkan alokasi anggaran 11 unit Eselon I pusat adalah sebesar Rp7.703.160.450.000,- ini ada ketimpangan yang terlalu jauh, mohon dijelaskan Pak karena 11 Dirjen saja 11,50% sementara yang untuk kantor urusan haji di Jeddah 88,50%.

Kemudian selanjutnya berkaitan dengan PHU ini Pak, yang info sudah santer dimana-mana bahwa akan dibuka proses perjalanan umroh itu sekitar 1 November yang memang masih *tentative*. Ada di Kementerian Dirjen PHU, kemudian ada di tingkat Kanwil/Kabid, ada ditingkat kementerian juga kasi, ini mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin diberdayakan kasi haji dan umroh yang ada di Kemenag kabupaten/kota agar biro perjalanan haji umroh yang akan melaksanakan perjalanan umrohnya ini, Kasi Haji Umroh di Kemenag kabupaten/kota bisa ada pengawasan terhadap trevel-trevel untuk perjalanan haji dan umroh. Karena ini sangat membludak dan sangat berapa banyak perjalanan umroh yang akan berlangsung dengan paska pandemi Covid-19. Sehingga betul-betul trevel atau perjalanan wisata umroh itu manakala akan mendaftarkan jamaahnya diberangkatkan menuju Arab Saudi untuk umroh itu agar melaporkan kepada Kasi Haji Umroh yang ada di kementerian kabupaten/kota. Sehingga adanya ikut pengawasan, mengapa demikian? Saya yakin ini mungkin bisa saja trevel-trevel yang nakal ini akan dengan memanfaatkan situasi pandemi dengan berbagai macam tipu dayanya. Sehingga kalau adanya pengawasan, Kasi Haji Umroh kementerian kabupaten/kota ini cukup berarti untuk membantu masyarakat yang akan melaksanakan keberangkatan dengan terawasi, itu.

Itu saja barangkali Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Sekjen dan Pak Ketua serta Pimpinan yang lain dan Anggota, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Satori dari Nasdem, kami persilakan dari Demokrat Ibu Harmusa, atau ya silakan.

**F-PARTAI DEMOKRAT (HARMUSA OKTAVIANI, S.E.):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pak Wamen dan jajaran;**

**Pimpinan beserta Anggota Komisi VIII.**

Pada kesempatan kali ini saya kira rincian dari alokasi anggaran sama seperti yang lalu, saya hanya ingin menekankan Pak bahwa di tahun 2021 kita belum tahu Covid ini sudah selesai atau belum. Jadi minta tolong agar program-program untuk penanganan Covid yang ada disini bisa benar-benar direalisasi, dan bantuan-bantuan untuk pesantren, madrasah ataupun Madin tetap bisa dijalankan, dan dikasih tambahan untuk pondok-pondok yang benar-benar terkena dampak Covid Pak. Karena pesantren-pesantren sekarang banyak sekali orang tua yang mengharapkan ada uluran tangan ada perhatian khusus dari Pemerintah, untuk anak-anaknya yang sekarang ini banyak sekali dari mereka yang dirumahkan.

Untuk itu mungkin pembelajaran jarak jauh yang sudah dianggarkan ini sangat membantu dan saya minta agar realisasinya bisa cepat Pak. Karena ini kalau misal ditunda-tunda dan penyalurannya juga lama kasihan mereka-mereka yang dari rumah tidak bisa mengikuti pelajaran seperti biasa, tidak bisa mengikuti kegiatan yang ada di pondok pesantren ataupun di madrasah. Dan saya menekankan agar bantuan BOP dan BOS bisa ditambahkan dan direalisasikan dengan cepat. Mungkin itu saja Pak dari saya, semoga kita semua bisa terhindar terlindungi dari Covid-19 dan semoga Pak Menteri juga dikasih kesembuhan dan keselamatan untuk teman-teman semua.

Terima kasih dari saya, *wabillahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Iya terima kasih Bu Harmusa banyak sekali usulan tadi disitu pasti mikirin itu Pak Wamen, ya memang kalau penyaluran terhambat tidak enak

ya. Iya sama Pak, sama Bu, kita kalau penyaluran terlambat juga tidak enak, jadi sama-sama tidak enak kalau terhambat.

Lanjut PKB, kelihatannya dari virtual Ibu Annisah Syakur. Wee cantik sekali ini Bu.

**F- PKB (Dr. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.):**

Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Bu belum dipersilakan Bu, belum saya persilakan Bu.

**F- PKB (Dr. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.):**

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**Bapak Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi VIII yang saya hormati,  
Yang terhormat Bapak Wamen dan jajarannya.**

Saya hanya menyoroti beberapa hal saja, menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kemarin itu di Kabupaten Pasuruan ada jamarah. Jamarah itu jagong masalah umroh dan haji yang narasumbernya itu dari pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang ini tidak bisa hadir, diwakili oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Kasi Haji dan Umroh yang dari Komisi VIII kebetulan yang diundang adalah saya.

Pada saat itu banyak hal yang saya sampaikan baik mengenai kebijakan-kebijakan mengenai haji yang banyak terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII, termasuk juga masalah BOS. Bahwa BOS akan dikembalikan itu juga adanya kesepakatan antara apa itu permohonan dari Komisi VIII yang kemudian direspon oleh Kementerian Agama. Mereka bertepuk tangan semua, merasa senang tapi ada ustadz yang kemudian mengacungkan tangan. Katanya, kalau memang itu benar kok sampai sekarang saya masih dipotong. Katanya begitu.

Setelah tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pak Wamen bahwa memang kita ini kalau menetapkan sesuatu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, ya tentu akan bisa memberikan penjelasan. Kemarin saya bilang cuma mungkin masih dalam proses gitu saja. Saya diplomasi saja jawabannya karena saya belum tahu bagaimana prosesnya, ternyata kan itu nanti prosedurnya sampai Desember itu nanti akan dikembalikan pada tahun berikutnya. Barangkali seperti itu saya minta penjelasannya yang lebih kongkrit mohon penjelasan yang lebih kongkrit. Karena Jamarah itu masih terus berlanjut di kementerian-kementerian kabupaten/kota yang lain yang kebetulan Dapil saya.

Kemudian yang kedua yaitu masalah BOP. Terus terang saja ada beberapa yang kebetulan yang kami bawa atau usulan dari Anggota Komisi VIII itu yang keluar masih sangat minim. Jadi tahapan pertama itu yang keluar baru sekitar 30%, yang 70% itu belum keluar, kami mohon bagaimana realisasi daripada BOP ini segera diturunkan SK-nya agar mereka-mereka yang sudah kita data dan sudah berharap-harap ini janganharap-harap cemas, tapi betul-betul bisa dibuktikan sesuai daripada adanya BOP tersebut. Itu yang kedua.

Dan yang ketiga kemarin juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu adalah masalah umroh. Yang jelas itu kapan sih umroh ini dibuka? Nah ini kami berharap adanya kejelasan yang bisa menunjukkan bahwa secara positif umroh itu yang sesuai dengan keputusan dari kerajaan Arab Saudi misalnya, itu bahwa untuk negara asing termasuk orang-orang Indonesia kapan? Ini harus ada kejelasan.

Saya kira itu saja beberapa hal yang kami sampaikan, terima kasih akhirnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Ibu Annisa Syakur dari PKB. Kita lanjutkan kepada meja pimpinan. Silakan Pak Moekhlas.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI :**

Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Siapa ini?

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI :**

... Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sudah Bu Nasdem sudah satu orang bu, peraturan dari Ketua DPR Bu saya tidak berani karena saya bukan Ketua DPR, satu fraksi satu orang Bu. Silakan Pak Moekhlas Sidik.

**WAKIL KETUA/F-PARTAI GERINDRA (LASDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A.):**

Terima kasih.

**Teman-teman dari Komisi VIII dan Para Bapak-Bapak dari Menteri Agama.**

Mungkin sudah lima kali pertemuan baru yang saya bicara lagi ini. yang pertama saya bicara hal-hal yang sifatnya strategis dulu Pak nanti yang teknis tadi kan rekan-rekan sudah semuanya. Teknis sampai kepada pekerjaan Bapak sekalian.

Yang pertama kami Anggota DPR kami ulang lagi kejelasan bahwa ada dua hal cara pandang bahwa kami secara internal itu kami mewakili Dapil. Tapi begitu eksternal kami mewakili rakyat Indonesia, sehingga kalau agak bicara agak keras Bapak yang mohon maklum saja, karena memang begitu dinamis, begitu spesifik negara kita yang terdiri dari 300 etnis barangkali, 17.500 pulau pasti banyak perbedaan yang kadangkala antagonis satu dengan yang lain. Yang kedua mewakili rakyat tadi juga bisa kita pandang secara internal dari Dapil dan eksternal dari di luar Dapil.

Yang kedua saya yakin *panjenengan* yang duduk di depan saya sudah lebih dari 25 tahun jadi pegawai. Kami tadi tanya ada yang berangkat dari UIN, ada berangkat dari politik barangkali Pak Wamen bukan tikus tapi politikus jangan sampai keliru tikus, tukang mengerat-mengerat itu jangan, kami juga politikus sekarang. Kami 37 tahun berada di ASN, atau berada di ranah pegawai. Yang saya ambil apa? Selalu yang disediakan negara pasti kurang.

Coba *panjenengan* catat mulai *panjenengan* 0 jadi pegawai sampai hari ini pasti kurang. Maka diperintahkan orang-orang jagoan yang duduk, tidak mungkin orang *plonga-plongo* tidak mungkin! Maka *panjenengan* orang-orang jagoan itu. Maka disitulah Bapak membuat namanya prioritas, mana yang bapak dulukan dan mana yang bapak belakangkan? Kalau sudah Bapak sudah berani begitu jangan ragu-ragu lagi, jangan disini *plintat-plintut* begitu, tidak bisa bapak begitu. Kalau sudah bapak ngomongkan kemarin a sekarang Bapak pegang a, kecuali ada hal yang darurat dan kita mau untuk merubah itu. Kalau tidak bapak pegang saja, karena rapat ini sering tidak efektif, karena sering kita *plintat-plintut* tadi. Mohon ini bapak pegang Pak, lain kali kalau ngomong a ya sudah sampai kiamat ya pegang a, sejauh tidak ada barang yang darurat.

Contoh tadi katanya BOS tidak dipotong ini kok dipotong, ujungnya masih cari Rp800.000.000,000,- miliar ke Menteri Keuangan lho kemarin bagaimana? Kemarin tidak ada kalimat itu? Hari ini kami dengar 800 miliar yang kemarin BOS dipakai akan diajukan pertanyaan berikut bagaimana kalau Menteri Keuangan tidak mau ngasih? Bagaimana jalan keluarnya? Oleh karena itu ini pelajaran untuk di 2021 mohon Bapak bisa betul-betul ancap-ancang yang benar.

Yang berikut mohon di lihat halaman 3 Pak di tulisan *sampeyan* di tabel 2 Pak. Ini sudah agak teknis ini. Ya tadi kan strategis yang dua hal tadi bapak-bapak camkan betul itu. Halaman 3 bapak mencantumkan mengenai fungsi panjenengan adalah fungsi agama dan fungsi pendidikan, dan bapak mencantumkan di fungsi pendidikan 83 koma sekian persen, disini tercantum Rp55.000.000.000.000,- Saya mohon Bapak waspada di daerah-daerah, karena banyak pejabat yang nakal, banyak pejabat yang perlu dijitak kalau perlu. Silakan itu Bapak, kerasi saja. Bapak kurang keras kadang-kadang, sudah tahu di bawahan salah masih saja terlalu diampuni, pecat saja tidak usah lama-lama biar berwibawa Pak. Kita menjadi tidak berwibawa karena ucapan kita sendiri tidak bisa membuktikan, itu menjadi perhatian bagi *panjenengan*.

Kemudian halaman 6 coba Bapak lihat Pak. Disini Bapak mencantumkan dipusat dan daerah juga begitu antara 11% dan 82%, oleh karenanya saya menyarankan untuk di daerah panjenengan mohon diawasi betul. Diawasi betul sekali lagi. Kami tidak bisa menerima sebagai wakil rakyat tatkala mengucapkan disini kami sampaikan kepada rakyat terus kami tidak bisa mempertanggungjawabkan. Karena kami tidak boleh *plintat-plintut* Anggota DPR, dilarang itu.

Yang terakhir masuk di halaman tadi 8 Pak tentang kendala Bapak mencantumkan kendala ada tiga hal disini. Saya yakin yang kendala-kendala bersifat strategis padahal masih banyak yang teknis. Yang pertama Bapak dokumen formal untuk lembaga pendidikan, ini sudah menjadi tabiat di daerah Pak, karena tadi 93% itu madrasah swasta yang mereka tidak paham, otaknya jangan dianggap kaya kita-kita yang sudah terdidik, mereka belum. Bagaimana mensiasati seperti ini? Mungkin bisa minta tolong kami, atau kami ceramahkan, kami kumpulkan bahwa untuk mengatasi dokumen formal sebagai berikut, sampaikan.

Yang kedua mekanisme pencairan dana. Masa sudah bertahun-tahun masih terulang dan terulang kesulitan mencairkan. Apa yang sulit? Ini harus dipintarkan juga ini. Di satu sisi kita sebagai orang yang lebih berilmu pengetahuan mari kita didik masyarakat yang belum.

Dan yang terakhir katanya disini, data penerima bantuan yang sudah di update. Kami juga tidak mengerti *update* data apapun yang katanya yang punya tanggungjawab Kemensos kah atau Kemendagri kah kok masih bermasalah? Mari ini kita pecahkan bersama pakai kami, pakai kami anggota DPR ini. Karena kami juga punya konstituen di daerah, punya TA-TA di daerah yang bisa membantu Bapak sekalian dalam konteks *mengupdate* ini. Di satu sisi bapak ada keluhan di sisi lain kami ada tenaga pakai kami. Kami insyaallah sangat ingin memajukan masyarakat kita.

Yang terakhir kami semua punya kewajiban Pak. Apalagi Bapak sebagai Wakil Menteri Agama ingin bahkan bahwa berulang kali rakyat menyampaikan kurang merasa Kementerian Agama di daerah. Nah ini sudah mulai bergeliat. Tidak hanya sekali lagi karena disini banyak rekan-rekan dari non muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Budha, ada Katolik atau Konghuchu mari semua-semua kita berdayakan. Islam mengajarkan kalau kita besar melindungi yang kecil, harus wajib itu. Tunjukkan dan bisa dirasakan oleh

beliau-beliau yang non muslim. Sebaliknya kalau kita jadi yang kecil menghormati yang besar. Insyaallah kalau ini bisa kita lakukan Bapak memegang amanah yang sangat mulia untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikummussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Moekhlas Sidik, Laksamana Madya. Biasa Pak Wamen kalau tentara orangnya ngomong begini pak, pensiun saja begini Pak bagaimana kalau aktif waktu itu Pak. Kita tidak tahu bagaimana itu, dan ini memang suka yang keras Pak kalau pak Moekhlas Sidik ini.

Silakan Pak Ikhsan Yunus dari Wakil Ketua Fraksi PDIP.

#### **WAKIL KETUA/ F- PDI PERJUANGAN (H.M. IHSAN YUNUS, M.E., Con. Std):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bissmillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII, seluruh Anggota Komisi VIII baik itu yang hadir secara fisik maupun virtual.**

**Pak Wakil Menteri Agama dan kepada seluruh Dirjen, para Direktur dan seluruh jajarannya.**

Tentunya kami merasa sedih sekali ketika mendengar berita bahwa pak menteri terkena positif corona. Kita semua berdo'a semoga beliau diberikan kesembuhan, semoga beliau bisa secepatnya kembali beraktifitas, karena kami sangat memerlukan beliau dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang strategis dimana kondisi negara ini sudah tidak kondusif lagi, Pak. Dengan adanya virus Covid-19 banyak sekali akrobat-akrobat yang harus kita lakukan, banyak sekali kekhususan-kekhususan yang harus kita lakukan karena memang tidak bisa diprediksi lagi seberapa besar korban baik itu kerugian secara ekonomi maupun kesehatan. Kita bisa bayangkan bahwa virus corona ini sudah ada dimana-mana Pak.

Jadi kalau misalnya kami yang di depan ini dan Bapak yang di depan saya ini belum terkena, karena memang itu Allah belum kasih saja. Semoga tidak, jadi memang betul-betul ini tidak terkendali Pak, sekelas pak menteri yang saya lihat selalu menjaga protokol Covid selalu pakai masker ya tanggal 14 September 2020 kita baru ketemu Pak, di ruangan ini berjam-jam, tanggal 17 dinyatakan positif. Kami kemarin langsung swab test semua di ruangan ini

Bapak lihat sampai 40 orang negatif semua Pak *alhamdulillah*. Tapi kan artinya memang ini sesuatu hal yang nyata dan tidak bisa kita kesampingkan dan ini memang hanya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa menentukan kamu kena, kamu tidak kena.

Ada berita di India seorang tua pasangan suami istri selalu di rumah hanya jalan pagi saja kena juga. Jadi memang kita harus melakukan perlakuan-perlakuan khusus untuk masalah Covid ini Pak Wakil Menteri. Maka jangan dikira kalau balik lagi ke politik anggaran saya kira ini harus fleksibel. Jadi nanti kita akan pantau kembali, kita lihat kembali, kita hitung kembali, dan anggaran-anggaran atau hal-hal yang mungkin bisa dihemat kita hemat pak. Karena kita tidak tahu seperti apa masa depan, jadi bulan Maret, bulan Februari kita bisa ketemu lagi Pak Ketua dan kita lihat mana yang bisa kita efisiensi dan kita berikan kepada mereka yang terdampak paling luar biasa Pak. Ini bicara masalah anggaran, karena saya tidak akan memperpanjang lagi detail masalah anggaran berapa a, b, c karena sudah selesai mau diapakan lagi? Walaupun kemarin kami masih memberikan ruang gerak untuk Kementerian Agama bisa mengatur kembali Pak Wamen. Tapi ternyata tidak. Artinya kan sudah merasa yakin bahwa ini adalah anggaran yang terbaik untuk Kementerian Agama dalam menghadapi Covid ini.

Oleh karena itu saya minta pertanggungjawabannya Bapak, ibu pertanggungjawabannya masalah anggaran bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kalau misalnya yang Bapak ajukan ini dan kemarin sudah kami berikan kemudahan untuk bisa dipindah-pindah ternyata tetap berarti ini yang kita pertanggungjawabkan bersama.

Ya jadi saya minta supaya betul-betul dijalankan dengan baik dan kalau ada efisiensi ada efektifitas agar anggaran-anggaran yang bisa dihemat itu dihemat. Perjalanan-perjalanan keluar, meeting-meeting yang besar, acara-acara besar itu kalau bisa ditiadakan. Karena apa? Kita perlu anggaran yang cukup besar untuk menghadapi ini. Covid ini tidak akan selesai Pak sampai dua, tiga tahun ke depan. Kalau kita lihat anggarannya ya kalau satu vaksin Rp400.000,- itu pemerintah baru menyediakan kurang lebih Rp36.000.000.000.000,- masih jauh Pak. 270 juta itu hanya seper sepuluhnya, seper dua puluhnya baru bisa tervaksin, dan itupun vaksinya sampai sekarang masih belum selesai uji klinis. Jadi kita harus selalu siap-siap sedia payung sebelum hujan. Ya sedia, kita siapkan anggaran kita baik-baik supaya kalau ada apa-apa kita siap. Jangan nanti di tengah jalan jadi masalah. Itu yang pertama.

Yang kedua tolong dilihat juga dari sisi anggaran nanti masalah kesetaraan. Saya beragama Islam pak, tapi *bismillahirrahmanirrahim* karena kita di Komisi VIII, Komisi VIII ini isinya bukan hanya muslim, tapi juga ada dari Kristiani, dari Hindu, dari Budha dan inilah bangsa kita Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Artinya tolong juga dilihat kesetaraan, keadilan bagi kawan-kawan kita ya, saudara-saudara kita yang beragama non muslim. Merekapun juga kena dampak Covid Pak. Karena Covid ini tidak memandang agama, tidak memandang jabatan, tidak memandang tua muda semua bisa terkena Covid.

Jadi tolong betul-betul diperhatikan jangan sampai ada yang dianaktirikan dari lementerian ini, karena ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi saya mohon untuk bimas-bimas yang lain juga dilihat, karena kita juga lihat di daerah-daerah banyak sekolah-sekolah apa itu namanya Pak Tomas itu ya, sekolah minggu apa sekolah pagi itu. Itu juga banyak juga bisa menjadi klaster baru, dan perlu bantuan uluran tangan, dan di sinilah pemerintah harus turun. Saya berharap pak Wamen bisa disampaikan kepada pak menteri agama jangan harus terus peka terhadap masalah-masalah seperti ini.

Yang terakhir saya ingin sampaikan masalah BOP. Kami ini baru Pak di Komisi VIII, tidak tahu adat istiadat, budaya, kebiasaan. Kalau misalnya ada bantuan operasional pendidikan yang istilahnya khususlah, ekstra diberikan oleh Kementerian Agama kepada apa namanya itu? Madrasah diniyah, takmiliyah, TPQ dan juga pesantren ya. Baru kali ini Pak. *Alhamdulillah* saya yakin dan percaya yang diperjuangkan oleh kawan-kawan itu sebagian besar tidak bermasalah. Tapi ini juga merupakan petunjuk, merupakan karunia kepada kami ketika kami turun ke lapangan kita tahu masalahnya ada dimana Pak? Masih banyak potongan-potongan bantuan operasional pendidikan di bawah. Ya, ada yang minta 5%, ada yang minta 10%. Luar biasa ini Pak, kok tega-teganya.

Maka kami semua saya yakin dari meja Pimpinan dan Anggota mengutuk potongan-potongan ini yang terjadi di lapangan. Padahal kita setengah mati cari anggaran Pak, ini dihemat, itu dihemat untuk ini kita alihkan kesini eh dipotong. Dan saya yakin Bapak, Ibu sudah mendengar masalah ini dan kita tidak bisa diam saja, kalau kita diam nanti orang jahat yang masuk Pak. Kita ini orang-orang baik semua, saya yakin kita orang baik semua disini, maka kita harus cari cara bagaimana caranya jangan sampai ada yang dipotong.

Bapak bayangkan yang sesuai dengan pemaparan tadi, yang mendapatkan itu 29.550 MDT, pondok pesantren 75 kategori besar, 455 kategori sedang, 8.981 kategori kecil, dan 20.125 TPQ tersebar di seluruh Indonesia sangat rawan adanya korupsi seperti ini, ya? Dengan total anggaran kalau sebelumnya 2,6 ini 2,599 beti beda tipis. Bayangkan pak kalau 2,6 setengahnya saja 1,3 dipotong 5% itu berapa Pak? Rp65.000.000.000,- padahal kita mau perjuangkan untuk apa bantuan madrasah saja setengah mati, dipotong dan ini oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Maka Pak Dirjen Pendis harus segera cepat membuat aturan. Jangan sampai ini terjadi ini tanggungjawab kita Pak. Kita yang salah, kita yang salah kenapa waktu kita turunkan ini tidak ada peraturan yang jelas, sehingga ada permasalahan di pencairan. Ada permasalahan siapa yang dapat? Maka keterbukaan itu penting, transparansi itu penting dengan adanya apa namanya teknologi, website dan seterusnya kan kita bisa lihat, siapa yang memajukan dan siapa yang ini? Dan tidak perlu itu calo-calo itu, saya secara pribadi mengutuk keras ini adanya potongan-potongan seperti ini, dan kita harus bertindak cepat Pak. Masih ada tahap kedua dan ketiga. Jadi sekali lagi kami mohon karena ini bukan ranah kami untuk memberikan petunjuk teknis,

kami mohon kepada Kementerian Agama untuk segera melakukan penertiban permasalahan BOP ini.

Itu kalau kita ngomong pak di depan kawan-kawan kita pesantren yang dapat, itu kok saya lihat ada yang murung itu satu, dua orang kenapa ini? Saya bilang. Ternyata ini calonya, gitu lho. Iya pak nanti ya sudahlah kalau tidak ada pemotongan. Ini kejadian Pak, kalau tidak ada pemotongan itu kan ada pembelian barang katanya, untuk Covid beli *hand sanitizer*, beli apa ya belinya dari kami. Lho jadi kamu yang ngatur saya bilang, kan tidak benar ini Pak Wamen. Jadi tolong ini menjadi perhatian supaya jangan terjadi nanti kita harus bisa menghindari hal-hal seperti ini.

Sekian dari saya terima kasih.

*Wallahu muafiq illa aqwamithariq.*

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Ya itu memang komitmen kita semua untuk tidak ada pemotongan pak dan biasanya itu kita umumkan. Terima kasih Pak Ihsan dari PDIP yang terakhir kami persilakan Pak Ace Hasan Syadzily dari Golkar.

#### **WAKIL KETUA/F-PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si):**

*Bissmillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Ketua, Pimpinan, Anggota, Pak Wakil Menteri Agama beserta seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir pada kesempatan ini.**

Pertama tentu kita masih patut bersyukur Pak bahwa anggaran Kementerian Agama walaupun ekspektasinya sangat tinggi pada pertemuan yang lalu, ada kenaikan yang signifikan. Tapi dengan kenaikan sebesar sekian ratus miliar dan itu dipergunakan untuk penanganan tunjangan guru non PNS, pengembangan pondok pesantren, dan KIP kuliah, ya patut kita apresiasilah. Kenaikannya itu memang kecil hanya 0,43% tidak seperti yang diharapkan oleh kita semua. Karena memang kita tahu bahwa memang di samping harus paham bahwa negara kitapun juga akibat Covid-19 ini secara ekonomi pasti penerimaan negaranya juga mengalami keterbatasan gitu. Jadi tentu kita dalam konteks ini tentu harus pintar-pintar untuk bagaimana mempergunakan anggaran tersebut dengan output yang lebih jelas, terukur, dan dapat sepenuhnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh kita semua.

Yang kedua, tentu kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak/Ibu sekalian terutama saya kira tadi penyesuaian-penyesuaiannya kan

sebetulnya kalau kita lihat masih dalam kerangka hampir sama dengan kerangka tahun 2020. Dukungan anggaran untuk kepentingan dukungan menajemennya masih sangat besar dan juga untuk fungsi pelayanan keagamaan untuk biaya operasional pegawainya masih sangat tinggi, barang operasionalnya juga masih seperti yang lalu. Begitu ya? Termasuk juga operasionalnya juga masih mencerminkan seakan-akan situasi seperti normal begitu.

Nah oleh karena itu Pak Wamen mungkin saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman, bahwa memang kita harus menyisir kembali situasi pandemi ini karena kalau kerangkanya masih normal pasti penggunaan anggarannya dalam situasi Covid ini akan berbeda. Misalnya tidak akan terlalu banyak lagi kunjungan-kunjungan ke perjalanan-perjalanan dinas, begitu ya pasti akan sangat terbatas. Jangan coba-coba ke kamipun juga sekarang ini untuk perjalanan dinas kunjungan-kunjungan keluar kota mikirnya panjang sekali, karena konsekuensinya ya itu tadi, kalau tidak membawa virus ya terpapar virus gitu di luar kota.

Nah kekawatiran tersebut memang muncul pada diri kita semua. Untuk itu maka baik pegawai-pegawai di tingkat pusat maupun pegawai-pegawai di tingkat daerah saya kira harus diarahkan untuk tidak mobilitasnya gitu. Tetap harus dengan protokol Covid-19, dan saya kira pasti akan ada efisiensi-efisiensi dengan protokol Covid-19 tersebut. Nah Pak Wamen oleh karena itu sebagaimana yang disarankan oleh teman-teman tadi bahwa penggunaan anggaran saya kira harus disesuaikan dengan kondisi Covid-19. Sehingga *feeling* saya ya ini *common sense* saya begitu, pasti akan terjadi efisiensi.

Oleh karena itu perlu ada semacam penyisiran kembali evaluasi yang terus-menerus dilakukan oleh kita terhadap penggunaan anggaran. Jangan sampai misalnya kita sudah menganggarkan sekian triliun, tetapi yang terpakai gara-gara keterbatasan Covid-19 ini membuat kita tidak berjalan program-programnya. Dan itu saya kira pengalaman satu ini Pak Dirjen kan kita bisa rasakan, yang seharusnya kita keluar kota, yang seharusnya kita perjalanan dinas semua menjadi sangat terbatas. Tapi bukan berarti bahwa tugas memberikan pelayanan menjadi terhenti, kenapa? Karena saat ini kita sudah bisa menggunakan teknologi untuk menjalankan program-program yang sesuai dengan, atau setidaknya biasanya kalau misalnya di diklat ya itu biasanya kita mengumpulkan calon CPNS, atau Sespim atau apapun namanya, jumlahnya 200 atau 100 orang kan kalau di era Covid seperti sekarang ini kan harus dibatasi, tidak boleh melebihi dari kapasitas. Sehingga itu tentu implikasinya konsumsinya akan berkurang, ya biaya akomodasinya juga akan berkurang dan lain-lain. Jadi oleh karena itu Pak Sekjen mohon nanti dievaluasi kembali ya soal efisiensi anggaran di tengah Covid-19 karena saya masih melihat bahwa postur anggarannya seakan-akan masih normal begitu.

Yang kedua saya membaca pada halaman 6 ya, bahwa ada alokasi khusus juga yang diberikan untuk penanganan Covid-19 di Kementerian Agama, yaitu sebesar 2,9 triliun dan kegiatan tersebut antara lain untuk APD-lah. Ya APD di lingkungan Kementerian Agama gitu, saya kira ini anggaran sebetulnya cukup besar ya, cukup besar. Ini asumsinya dan ini saya kira tersebar di semua direktorat. Jadi di semua direktorat mungkin ada alokasi

tertentu yang dipergunakan untuk membeli APD kan begitu? Baik di Bimas Islam, di Bimas Kristen, Katolik, Hindu termasuk di Dirjen Agama Islam. Apakah memang demikian konsepnya? Soal pengadaan dari berbagai macam alat APD di lingkungan Kementerian Agama ini.

Nah termasuk juga apakah misalnya penggunaan untuk apa namanya pendidikan jarak jauh, yang kemarin diajukan 3,8 triliun ini apakah sudah ada kabar yang menggembirakan dari Kementerian Keuangan? Saya kira itu harus jelas Pak, sebab lagi-lagi jangan sampai Bapak/Ibu sekalian ada kecemburuan yang dialami oleh anak bangsa kalau anak madrasah tidak dapat kuota tetapi anak yang belajar di SMA, SMP, SD, TK mereka tiba-tiba dapat kuota. Dan mereka memiliki sistem distribusi kuota yang sudah ter apa namanya? Tersistem dengan baik begitu? Walaupun kemarin juga ada sempat juga yang nyasar, tiba-tiba anaknya, Pak Alvin Lee dapat apa namanya dapat kuota Pak. Jadi berarti kan ada yang salah dari proses distribusi kuota internet yang seharusnya didapatkan untuk anak-anak tetapi nyasar kemana-mana begitu, ini perlu diperbaiki dengan sebaik-baiknya.

Jadi oleh karena itu Pak Menteri, Pak Wakil Menteri saya kira juga harus jelas terukur ini soal bantuan untuk Covid-19 yang nilainya 2,9 ini, misalnya di poin 3 ada bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga yang terdampak Covid-19, apa benar Kementerian Agama mau mengurus ini? Gitu ya apa benar? Karena kan apa namanya ini kan sebetulnya mohon maaf ya, ini kan ranahnya Kementerian Koperasi dan UKM gitu, atau dalam bentuk apa pemberdayaan ekonomi yang dimaksud? Saya kira harus *clear* ini Pak supaya nanti operasionalnya menjadi sangat jelas. Kalau fasilitasi sertifikasi halal okelah karena memang itu harus menjadi tugas dan tanggungjawab BPJPH begitu.

Kemudian juga soal bantuan operasional ormas keagamaan oke gitu. Cuma memang harus terukur juga Pak Dirjen, Pak Qamar, Prof. Qamar ya. Saya kira hal-hal semacam ini harus terukur ya termasuk juga bantuan pelaksanaan jarak jauh untuk dosen, guru, mahasiswa yang terdampak. Jadi intinya yang kami ingin tegaskan bahwa apapun program yang kita lakukan itu konteksnya jangan sampai misalnya ada alokasi khusus untuk bantuan Covid tetapi di sisi lain postur anggarannya masih terlihat normal. Itu menurut saya namanya sangat tidak konsisten, inkonsistensi disitu. Nah oleh karena itu Pak Ketua saya kira penting untuk nanti juga secara berkala kita melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran itu.

Dan yang paling terakhir soal umroh ya Pak Sekjen, Pak Dirjen ya saya juga mendengar mendapatkan informasi kalau untuk apa, warga negara Arab Saudi bulan Oktober depan ini sudah mulai dibuka tapi dengan tahapan 30% sampai 70%. Tetapi untuk warga luar negeri Arab Saudi baru tanggal 1 November, itu penjelasan resmi dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Cuma *problem* buat kita adalah soal bagaimana kitanya sendiri? kitanya sendiri penyelenggaraan umroh kita, jangan sampai pertama karena kita ini tak menentu soal jumlah penderita Covid-19 di Indonesia ini. Yang kedua tentu ini akan berimplikasi terhadap anggaran atau biayanya, walaupun itu diserahkan ke swasta tapi apakah kemudian standar pembiayaannya itu jelas atau tidak? Dan terutama yang paling penting sebetulnya Pak Dirjen, kita

memikirkan orang yang kemarin batal untuk umroh. Nah itu pasti pengurusannya agak *njlimet* itu.

Saya kira itu pak Ketua terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Tadi Pak Wamen saya lupa memperpanjang waktu, sekarang sudah 12.40 mudah-mudahan Pak Wamen punya waktu 10 menit, kemudian 10 menit untuk membacakan kesimpulan Pak. Karena ini tidak banyak hampir sama semua, intinya kita dukung anggaran Kemenag, termasuk tambahan di anggaran berjalan nanti.

Silakan Pak Wamen.

#### **WAKIL MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:**

Baik terima kasih Bapak Ketua.

#### **Bapak Ketua yang terhormat; dan Para Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang berbahagia.**

Banyak sekali masukan-masukan dari Anggota yang terhormat, ada dalam catatan kami ada 12 atau 13. Yang pertama dari Bapak Syamsu Niang, Ibu Diah Pitaloka, kemudian dari Bapak Ali Ridho, Pak Ali Taher dari PAN komisaris utama. Kemudian dari Bapak Husni, Pak Bukhori Yusuf, kemudian Ibu Harmusa, Bapak Satori, kemudian Ibu Annisa Syakur, Bapak Moekhlas dari Pimpinan, kemudian Pak Ihsan Yunus dan Pak Ace Hasan Syadzily. Saya kira dari banyak pertanyaan, dan dari banyak tanggapan saya memberikan satu, saya akan menjawab beberapa besarnya, nanti mohon izin bapak Pimpinan kalau masih ada pendalaman saya minta dari Eselon I untuk bisa memberikan tanggapan.

Yang pertama berkaitan dengan realokasi anggaran saya kira kita semuanya sepakat bahwa politik anggaran kita harus fleksibel kemudian sensitif terhadap krisis ya? Sehingga nanti kita akan terus mencermati, melakukan evaluasi, karena dinamisasi dan fluktuasi, perkembangan situasi ini akan terus berkembang. Untuk itu kami sepakat bahwa per kuartal nanti kami akan melaporkan kembali kepada Dewan yang terhormat ya di Komisi VIII. Kalau misalnya tadi bapak Ketua menyampaikan bulan Januari, Februari kuartal pertama, kami akan memberikan laporan, sehingga akan kita lakukan penyisiran-penyisiran realokasi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan prioritas anggaran, juga dukungan anggaran yang lain. Dan juga termasuk yang tadi keseimbangan anggaran secara berkeadilan, saya kira ini akan menjadi prioritas dan sekali lagi mohon dukungan dari yang terhormat para Anggota Dewan.

Kemudian yang kedua terkait dengan BOP. Ya kami juga sepakat bahwa BOP ini akan kita perjuangkan menjadi anggaran tetap. Dan tentunya untuk anggaran tahun 2021 karena sudah masuk dalam pembahasan di Banggar dan nanti akan dibawa ke Banggar Besar. Untuk itu kami berharap ketika nanti ada ruang untuk dibahas di APBN perubahan kami mohon dukungan dari Komisi VIII. Tapi kami akan memastikan bahwa usulan secara bertahap mungkin penambahan BOP yang tahun ini itu kami baru mengalokasikan anggaran sekitar Rp5000,-. Saya bilang sama bapak Dirjen bahwa Rp5.000,- itu belum ada prestasinya sebagai Dirjen baru. Karena masih sama dengan yang diusulkan oleh Dirjen yang lama, he o dulu Rp4.000,- ada kenaikan nanti saya lihat kembali. Saya lihat kembali belum ada prestasinya. Gitu ya kami akan pelototi Pak Pimpinan agar ini menjadi keberpihakan kita untuk kita mendukung program untuk pondok pesantren. Dan saya juga setuju bahwa dalam pelaksanaannya sekarang ini baru tahap pertama dan insyaallah sudah tahap kedua disiapkan, dan sudah ditandatangani. Kami targetnya tanggal 22 Oktober sudah selesai bapak Pimpinan. Bersamaan dengan peringatan Hari Santri Nasional, ini bagian dari hadiah untuk pondok pesantren.

Untuk itu kami juga sekali lagi mohon dukungan dan juga evaluasi, memang masalah-masalah di lapangan berkaitan dengan ada data, tadi disebutkan ada beberapa potongan-potongan. Untuk itu, kami terus mencermati dan melakukan evaluasi dari bapak Irjen juga sudah membentuk tim siber pungi ya bahkan kami sudah membuka *hotline* untuk laporan-laporan dari masyarakat. Sehingga kami akan tindaklanjuti untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar dilaksanakan, diberikan sesuai dengan yang berhak mendapatkan, sesuai dengan tepatan anggaran, tepat waktu, tepat administrasi, dan juga tepat guna. Ya saya kira ini menjadi komitmen kami.

Kemudian dari Bapak Husni saya setuju bahwa FKUB harus diperkuat. Memang Pak PBM Nomor 8 dan nomor 9 itu yang menjadi payung hukum FKUB, selama ini kami memperhatikan bahwa FKUB hanya didukung dari Kementerian Agama. Seharusnya Pemda baik itu provinsi maupun kabupaten juga ikut mendukung dalam pengamatan kami ketika FKUB itu tidak berjalan dengan baik, konflik-konflik agama di daerah itu relatif bisa direda. Karena setiap ada gejolak atau ada konflik itu tokoh-tokoh agama turun, kemudian dia ikut mendamaikan, atau menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Untuk itu kami juga mohon dukungan ketika bapak dan ibu sekalian turun ke daerah mohon didukung dari Pemdanya untuk bisa memperkuat FKUB tersebut. Karena ada banyak anggapan bahwa fungsi agama ini vertikal, sehingga itu hanya merupakan urusan dari Kementerian Agama. Sementara dari provinsi atau dari kabupaten ada yang begitu memberikan perhatian yang luar biasa tapi juga yang kurang.

Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan BOS sekali lagi kami memang harus menyampaikan bahwa kondisinya ketika terjadi pemotongan itu kami betul-betul dalam posisi yang sangat sulit, tidak ada lagi alokasi yang bisa kami lakukan sehingga kami harus mengambil, karena ini dalam bentuk *emergency*, ya dan dalam Perpu nomor berapa terkait dengan penanganan Covid ya memang dimungkinkan tidak melakukan apa namanya konsultasi

dengan Komisi VIII. Tapi sekali lagi ini memang kondisi yang *emergency*. Tapi kami akan mengupayakan kembali bahwa kekurangan dana BOS itu akan dikembalikan, itu komitmen kami.

Kemudian yang berikutnya betul bahwa data Emis akan terus kami *update*, dan itu akan menjadi ini menjadi berkah ya. Karena setelah sekian lama data Emis itu tidak kami tengok insyaallah ke depan akan lebih diperbaiki. Kalau umroh nanti bapak Dirjen Haji dan Umroh untuk bisa memberikan jawaban.

Masalah sertifikasi penceramah saya kira sudah hampir dapat dikatakan bisa diterima karena kami betul-betul memperhatikan dan menerima masukan dari Ketua Komisi VIII yang terhormat. Ya ini luar biasa, dan itu yang bisa menyelesaikan banyak apa namanya? Perbedaan-perbedaan dalam kaidah *fiqiyah*, *alkhurusy minal qillah mustahaq* begitu ya. Artinya kita keluar dari, karena persoalan yang diperdebatkan kemarin itu masalah sertifikatnya itu. Kami tidak mau terjebak pada polemik itu. Yang penting adalah bagaimana penguatan terhadap kompetensi para penceramah, ya khususnya pada nilai-nilai moderasi beragama, dan juga masalah komitmen kebangsaan.

Kemudian beasiswa luar negeri kami belum bisa memberikan tanggapan dan alokasi anggarannya. Ini kami harus betul-betul cermati, karena kami tidak berani berjanji apalagi berjanji dihadapai Anggota yang terhormat. Ini menjadi saya paham dan bapak paham, kita sama-sama paham. Begitu ya tapi kami akan memperhatikan ya secara sungguh-sungguh nasib teman-teman, adik-adik kami yang kuliah di luar negeri.

Kemudian berkaitan dengan penanganan Covid yang tadi disampaikan oleh Bapak Ace saya kira ini penting, program-program harus betul-betul bisa terukur, dan sasarannya jelas. Kami akan lihat kembali Pak Pimpinan untuk nanti kami laporkan dalam sidang-sidang berikutnya. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, sedikit tambahan mohon izin nanti Bapak Dirjen Haji karena tadi berkaitan dengan masalah umroh, ya dan perkembangannya silakan pak Plt. dan juga Dirjen PHU.

#### **DIRJEN PHU KEMENAG:**

Baik terima kasih atas seizin Wamen dan Ketua. Baik saya rasa memang ini sebenarnya isu aktual baru tadi malam kita terima, dimana ada pengumuman resmi dari Pemerintah Arab Saudi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena yang punya otoritas terkait dengan ini. Ada tiga hal yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah Pemerintah Arab Saudi itu mengizinkan warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Saudi atau mukimin untuk menunaikan ibadah umroh mulai 4 Oktober 2020 ini dibatasi 30% saja, karena 30% dari kapasitas Masjidil Haram.

Lalu yang kedua mengizinkan ibadah umroh dan shalat di Masjidil Haram bagi WNI Saudi dan mukimin 18 Oktober 2020 ini sebanyak 75% dari kapasitas di Masjidil Haram, artinya 15.000 jamaah umroh per hari, dan 40.000 jamaah shalat ma'tubah per hari, itu 75% ini tahap yang kedua.

Tahap yang ketiga sudah mulai menampung dari negara-negara lain, yakni mengizinkan ibadah umroh dan shalat bagi warga negara Saudi, mukimin dan orang dari luar negeri Saudi per 1 November 2020. Tapi ada catatannya dua. Satu, sambil menunggu pandemi Covid-19, ini catatannya. Catatan yang kedua adalah apa namanya Kementerian Kesehatan akan merilis, jadi tidak semua negara nanti akan boleh, tetapi sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Jadi Kementerian Kesehatan Arab Saudi akan merilis daftar negara dari luar Kerajaan Arab Saudi yang diizinkan masuk atau memberangkatkan jamaah umroh.

Jadi mudah-mudahan Indonesia ini melalui teman kita yang di Saudi itu dan juga melalui jalur diplomasi untuk bisa memasukkan Indonesia ini dalam daftar yang boleh memberangkatkan umroh. Jika tidak ya artinya masih tertutup untuk berangkat umroh. Jadi ini catatan dua Pak Ketua, yang pertama itu tadi menunggu pandemi Covid-19, yang kedua adalah menunggu rilis dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi negara mana yang akan diperbolehkan menunaikan ibadah umroh. Sehingga ini diharapkan 1 November 2020 memang 100%. Jadi untuk umroh ada 20.000 jamaah, untuk yang shalat berjamaah di Masjidil Haram itu 60.000 jamaah per hari. Saya rasa itu mungkin terima kasih.

#### **WAKIL MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:**

Terima kasih Bapak Pimpinan, atau ada tambahan dari Dirjen yang lain? Pak Irjen cukup? Baik terima kasih Bapak Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):**

Terima kasih pak Wamen, pak Sekjen Plt sekaligus menjawab tentang umroh, do'a kita semoga Indonesia termasuk daftar *list* yang diperbolehkan untuk berangkat ke tanah suci.

Baik pak Wamen beserta seluruh jajaran, para Anggota, para Pimpinan kita sudah sampai di penghujung rapat dengan membacakan draft kesimpulan mohon ditampilkan. Saya akan membacakan per kata, termasuk angka-angkanya tolong dicermati nanti kalau ada perbaikan mohon untuk segera disampaikan *to the point* bagian mana yang akan diperbaiki.

DRAF KESIMPULAN RAPAT KERJA  
KOMISI VIII DPR RI  
DENGAN  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
Masa Persidangan I  
Tahun Sidang 2020 - 2021  
Rabu, 23 September 2020

Pada rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia membahas, penyesuaian RKA K/L Kementerian Agama Republik Indonesia

hasil pembahasan Badan Anggaran dan isu-isu aktual, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 hasil penyesuaian Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp66.961.386.828.000,- yang dialokasikan untuk program pada unit Eselon I sebagai berikut:
  - 1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.280.000.000.000,-
  - 2) Inspektorat Jenderal sebesar 170 miliar koma sekian.
  - 3) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebesar Rp.52.523.000.000.000,-
  - 4) Dirjen Bimas Islam sebesar Rp.5.757.000.000.000,- sekian;
  - 5) Dirjen Bimas Kristen sebesar Rp.1.800.000.000.000,-
  - 6) Dirjen Bimas Katolik sebesar Rp.899.724.000.000,-
  - 7) Dirjen Bimas Hindu sebesar Rp.803.751.000.000,- sekian;
  - 8) Dirjen Bimas Budha sebesar Rp.272.661.000.000,-
  - 9) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebesar Rp.1.593.000.000.000,- sekian;
  - 10)Badan Litbang dan Diklat sebesar Rp.693.000.000.000,- sekian;
  - 11)Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebesar Rp.97.497.000.000,- sekian.Total seperti yang saya sebutkan tadi yaitu sebesar Rp.66.961.386.828.000,-
2. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran dimasa pandemi Covid-19 Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan anggaran masing-masing program di unit Eselon I yang hasilnya dilaporkan kepada Komisi VIII DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama Republik Indonesia untuk:
  - a. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mempercepat pelaksanaan pengembalian atas potongan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada madrasah dan penambahan anggaran untuk mendukung pembelajaran jarak jauh pada tahun anggaran 2020;
  - b. meningkatkan realisasi bantuan operasional pondok pesantren, MDT, LPTQ dan TPQ tahun 2020 yang sampai dengan 16 September 2020 serapan anggaran baru sebesar 37,14%;
  - c. melakukan realokasi anggaran pada tahun anggaran 2021 sejak awal tahun dari anggaran non operasional untuk bantuan

operasional pesantren, MDT, dan LPTQ atau TPQ serta bantuan untuk mahasiswa di luar negeri pada masa pandemi;

- d. mengupayakan anggaran peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit, Pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri; (Ini usul pak Syamsul Niang ini, salah satunya itu Alauddin Makassar, sama Gunung Jati, Sunan Gunung Jati Bandung, dan lain-lain)
- e. menyusun kebijakan untuk rencana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di masa pandemi.

Tadi sudah disampaikan oleh pak Sekjen, Dirjen PHU.

Mungkin itu Pak Wamen kami silakan dulu apakah ada perubahan sebelum saya lemparkan kepada para Anggota dan Pimpinan.

#### **WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Terima kasih bapak Pimpinan, bapak Ketua yang saya hormati, saya mencermati dari draf kesimpulan yang disampaikan, atau yang disajikan di dalam rapat yang terhormat ini, kami bisa menerima dan menyetujui kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama.

#### **DIRJEN PENDIS KEMENAG:**

Tambahan saja, untuk butir 3. Nomor 3 butir d itu tidak dispesifikan rumah sakit pendidikan sarana prasarana PTKIN gitu saja.

#### **KETUA RAPAT :**

Ulang-ulang.

#### **DIRJEN PENDIS KEMENAG:**

Yang nomor 3 butir d mengupayakan anggaran peningkatan sarana prasarana rumah sakit pendidikan di perguruan keagamaan Islam, rumah sakit pendidikannya itu *didrop* untuk memudahkan fleksibilitas nanti.

#### **KETUA RAPAT :**

O jadi yang penting sarana diperguruan tingginya.

**DIRJEN PENDIS KEMENAG:**

Sarana dan prasarana di perguruan tinggi itu biar arahnya juga kesana begitu.

**KETUA RAPAT:**

Rumah sakitnya, betul-betul sarana dan prasarana Pendidikan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri gitu ya.

**WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Ya oke-oke.

**KETUA RAPAT :**

Iya benar itu, kalau rumah sakit nanti yang pak Bukhori tidak masuk, iya-iyanya. Nanti kalian berdua berantem saya tidak mau itu terjadi. Oke.

**WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Ada satu lagi bapak Pimpinan mohon maaf ini ada redaksional saja poin 3 butir c “melakukan realokasi anggaran pada tahun anggaran 2021 sejak awal tahun dari anggaran non operasional antara lain” ada kata “antara lain” ya, antara lain untuk bantuan operasional pesantren, MDT, dan LPTQ, dan selanjutnya” artinya nanti terbuka kemungkinan untuk yang lain.

**KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):**

Ya, ya betul jangan dikunci hanya untuk ini saja Pak ya? oke bagus.

**WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Iya kalau “untuk” seolah-olah hanya dibatasi pada poin-poin yang disebutkan.

**KETUA RAPAT :**

Oke bagus-bagus.

**WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Ada lagi dari teman mungkin?

**KETUA RAPAT:**

Dari Eselon I yang lain?

Cukup. Silakan para Anggota,

**F-PKS (BUKHORI YUSUF):**

Saya ada Pak Ketua tambahan.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak K.H. Bukhori.

**F-PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):**

Yang pertama poin 3 huruf b itu saya kira bukan meningkatkan, tetapi menuntaskan realisasi bantuan operasional pondok pesantren, MDT dan seterusnya tahun 2020 yang sejumlah 21.000 gitu kan, yang sampai sekarang baru 37%. Itu satu.

**KETUA RAPAT:**

Kalau menuntaskan berarti harus habis Pak, sementara kalau tadi kalau tidak ada badan hukumnya tidak bisa ditransfer. Ini artinya 2,6 triliun memang belum tentu habis, tapi kalau meningkatkan itu misalnya mungkin 90%, 97% kalau menuntaskan berarti harus dihabiskan.

**F-PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):**

Baik jadi yang penting Pak Ketua pahami itu.

**KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):**

Iya paham-paham. Kalau paham ini kita sangat memahami, iya. Yang penting kalau bisa dihabiskan tidak boleh disisakan kan begitu kan? Tapi kemungkinan ada sisa ada, karena tidak semua pondok pesantren punya badan hukum. Gitu kan Pak Dirjen?

**F-PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):**

Yang kedua Pak, yang kedua tambahan poin yang tidak ada ini kita usulkan perlu bahwa pengajuan anggaran tambahan 2,6 triliun untuk bantuan madrasah, MDT dan seterusnya itu untuk tahun-tahun berikutnya supaya nanti masuk dalam pagu indikatif yang tahun yang akan datang, itu belum masuk itu.

**KETUA RAPAT:**

Iya betul-betul,

**F-PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):**

Tolong diredaksikan itu.

**KETUA RAPAT :**

Jadi meminta Kementerian Agama untuk memasukan. Oh iya jadi itu nomor 2, nomor 3 nya ini nih. Nomor 3 -nya, tidak dia di nomor 3 nah nomor 3 jadi nomor 4. Nomor 3 Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama untuk memasukkan secara langsung anggaran BOP pesantren dan lain-lain, BOP pesantren, MDT, LPTQ. Bantuan operasional madrasah, kemudian pondok pesantren, MDT dan TPQ pada tahun anggaran 2022. Jadi ini resmi di pagu anggaran Pak Wamen ya?

**WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Ya mungkin redaksinya ada sedikit diubah Bapak Pimpinan. Saya mengusulkan, Komisi VIII DPR RI mendukung rencana Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memasukan anggaran. Kalau mendukung kan kita bersama-sama begitu.

**KETUA RAPAT :**

Kalau mendorong arahnya belum jelas Pak, ini mendukung ininya. Mendukung rencana Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memasukan anggaran. Oke-oke bagus.

**WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke siap. Cukup pak Bukhori? Pak Bukhori jangan terus terima telpon, cukup tidak Pak? Pak Bukhori, cukup tidak ini? Apanya yang setuju? Tidak nanti mendukung dulu Pak nanti setelah dibahas kita setuju. Jadi ada tingkatannya dulu, masak belum dimasukkan sudah didukung Pak, eh sudah disetujui, dimasukkan dulu baru kita setuju.

Silakan ada, masih ada dari Anggota? Pak Husni.

**F-PARTAI GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Itu pak yang tadi itu kata-kata, mana ya tadi ya? Melakukan realokasi antara lain untuk bantuan operasional pesantren, MDT, TPQ swasta Pak ya?

**KETUA RAPAT :**

Iya swasta.

**F-PARTAI GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Kata-kata swasta dibelakang itu Pak. Mana tadi ya yang barusan diini, nomor 3 itu, he eh, operasional madrasah, pesantren, MDT, TPQ swasta. Jadi ini kan madrasah, pesantren, MDT, LPTQ ini kan swasta semua jadinya kan Pak? Oh iya terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Madrasah dan negeri Pak, swasta kalau pondok pesantren belum ada yang negeri, MDT. TPQ dan LPTQ kali satu, LPTQ/TPQ ya.

Masih ada Pak Satori? Pak Ali? Cukup? Pimpinan cukup ya. Baik.

**WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Pimpinan sebelum ada yang terlewat saya kira ini juga penting semangat kita adalah tadi seperti yang diusulkan oleh Pak Ihsan Yunus adanya keseimbangan, kesetaraan dan juga keadilan terhadap lembaga pendidikan lain. Untuk itu saya mengusulkan butir 3 huruf c ada penambahan “dan lembaga keagamaan lainnya”

**KETUA RAPAT :**

Iya-iya betul-betul, serta bantuan untuk pesantren dan lembaga keagamaan lainnya, serta bantuan untuk mahasiswa di luar negeri. Oke betul-betul. Poin 3 juga ditulis itu poin 3, poin 3.

**WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Poin 3 yang di atas lagi,

**KETUA RAPAT :**

Ah ini tambahi juga. Jadi memasukan bantuan anggaran non operasional madrasah swasta, pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Artinya disini ada Kaledi dari Budha, Pak Tri dari Hindu Pak Yohanes dari Katolik, Pak Thomas dari Kristen, Konghuchu yang belum ada Pak ya? Ya tapi mungkin bagian dari Satker mana itu, Konghuchu? Sekjen ya.

Saya dengar itu Pak Tri itu sekolah-sekolah di Bali itu menyedihkan begitu pak, termasuk Pak Yohanes ini tentunya, usulan kemarin itu banyak sekali. Saya hitung hampir 2,4 triliun dari 4 yang mengusulkan. Cukup pak Wamen?

**WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Cukup terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Oke, baik Pak Wamen beserta seluruh jajaran, para Anggota baik yang datang secara fisik maupun virtual dari meja Pimpinan saya tidak membacakan lagi draf kesimpulan yang sudah mengalami banyak perubahan

dan perbaikan. Saya ingin menanyakan kepada Raker kali ini apakah draf kesimpulan yang saya sudah bacakan tadi dan sudah kita perbaiki baik dari sisi angka maupun kalimat bisa kita setuju untuk menjadi kesimpulan dalam rapat kerja kali ini? Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik. Alhamdulillah terima kasih Pak Wamen kita sudah dipenghujung Raker kita pada hari ini, kami persilakan Pak Wamen untuk menyampaikan kata akhir dari rapat kerja hari ini. Kami persilakan Pak.

**WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

**Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua; dan**

**Bapak Anggota Komisi VIII dan pejabat Eselon I dari Kementerian Agama yang saya hormati.**

Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa menyelesaikan Rapat Kerja, dan *alhamdulillah* beberapa keputusan-keputusan merupakan keputusan yang sangat penting dan kami menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan, atas perhatian dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi keputusan ini bisa kita realisasikan dalam bentuk pelaksanaan tugas-tugas nantinya.

Demikian dan terima kasih sekali lagi.

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Pak Wamen beserta seluruh jajaran Eselon I dan Eselon II para Anggota, para Pimpinan *alhamdulillah* kita sudah merampungkan Rapat Kerja pada hari ini mudah-mudahan seperti kata Pak Wamen tadi bisa kita kawal dan bisa kita realisasikan untuk bangsa dan negara.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah rabil'alamiin*, maka rapat kerja ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13:00 WIB)**

**Jakarta, 23 September 2020**

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197309261997031001**